

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan kebijakan dan Tinjauan Teori**

##### **1. Tinjauan Kebijakan**

Penyaluran cadangan pangan merupakan salah satu program pemerintah sebagai bentuk pemecahan masalah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan berupa beras. Program tersebut tentu saja memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan tingkat daerah.

##### **a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah**

Salah satu kebijakan pusat yang mengatur penyelenggaraan penyaluran cadangan pangan, dalam penyelenggaraannya pemerintah memfokuskan pada bagian pangan pokok tertentu yaitu pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pengaruh terbatasnya ketersediaan pangan untuk masyarakat yang kesulitan memperoleh pangan yang terjangkau baik dari segi harga atau kualitas pangan yang tersedia. Lahirnya Perpres nomor 125 tahun 2021 merupakan gerakan pemerintah dalam menunjang ketersediaan pangan pokok masyarakat. Pemerintah telah menetapkan bahwa jenis pangan tertentu meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Pada dasarnya penyelenggaraan pertama untuk cadangan pangan pokok dilakukan untuk jenis pangan pokok tertentu terlebih dahulu, seperti beras, jagung, dan kedelai. Ketiga jenis pangan pokok tersebut merupakan pangan primer yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia, sehingga

keberadaannya dianggap penting untuk disalurkan pertama kali di masyarakat Indonesia.

Melalui PerPres ini, penyaluran cadangan pangan pokok diartikan sebagai persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola pemerintah untuk dapat menanggulangi kekurangan pangan dimasyarakat dan untuk menghadapi krisis pangan dimasyarakat. Penyelenggaraan cadangan pangan pokok dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Tahapan pengadaan merupakan pembelian pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai cadangan pangan pokok. Pembelian yang dilakukan pemerintah mengutamakan pada produksi dalam negeri seperti halnya stok yang berada pada perusahaan umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan. Jika dirasa pemenuhan cadangan, menjaga stabilitas harga dalam negeri, dan memenuhi kebutuhan pemerintah tidak cukup, pengadaan cadangan pangan pokok bisa dilakukan dengan membeli dari luar negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat.

Tahapan pengelolaan merupakan penyimpanan, pemeliharaan, dan pelepasan stok atas pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai cadangan pangan pokok. Adanya pengelolaan bertujuan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pokok melalui mekanisme perputaran stok secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain menjaga cadangan pangan pokok, pengelolaan bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang berada dengan mekanisme memanfaatkan teknologi yang mampu menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk. Cadangan pokok pangan yang sudah mendekati masa kadaluwarsanya dapat dilakukan penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.

Tahapan penyaluran merupakan pengeluaran cadangan pangan pokok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyaluran

dapat dilakukan sebagai bentuk penanggulangan kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Adanya penyaluran bertujuan untuk stabilitas harga pangan, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan. Mekanisme penyaluran dilakukan oleh kepala badan daerah setempat dengan melihat kondisi dan situasi tempat cadangan pangan pokok yang berada di daerah tersebut.

Pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan pokok untuk masyarakat Indonesia dilakukan kerja sama dengan Perum BULOG dan BUMN pangan. Penyelenggaraan dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara, keseluruhan kegiatan yang memerlukan biaya pengeluaran oleh perum BULOG dan BUMN pangan akan diberikan kompensasi dari pemerintah langsung.

Secara garis besar kebijakan pemerintah pusat Perpres Nomor 125 Tahun 2022 merupakan pembahasan secara umum terkait penyelenggaraan cadangan pangan pokok untuk masyarakat. Kejelasan mengenai jenis pangan yang diberikan hingga tahapan awal dan tahapan penyaluran cadangan pangan pokok berada di dalamnya. Mekanisme yang ingin dijalankan dalam penyelenggaraan cadangan pangan pokok jelas dapat dilaksanakan. Kerja sama yang dibangun pemerintah dengan Perum BULOG dapat menjadi kekuatan untuk dapat menyalurkan cadangan pangan pokok kepada masyarakat dengan tepat sasaran.

**b. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan**

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan badan milik negara yang dibentuk tahun 2021 dengan tujuan mengatasi masalah pangan di Indonesia. keberadaan Bapanas berencana untuk

menyediakan kecukupan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, serta keamanan pangan. Badan yang bergerak langsung dan bertanggung jawab kepada presiden menjalankan tugasnya dalam penyaluran cadangan pangan pokok kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian dilakukan atas dasar mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

Bapanas menerangkan bahwa penyaluran cadangan pangan pokok merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola pemerintah untuk dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah pangan, krisis pangan, dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin. Penyaluran cadangan pangan pokok yang dilakukan Bapanas mengarahkan kepada masyarakat yang secara data tergolong dalam keadaan miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. Masyarakat yang terdata merupakan hasil kesepakatan bersama antara kementerian atau lembaga yang berkaitan langsung dengan bidang pembangunan manusia, sosial, pertanian, penanggulangan bencana, pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Peraturan Bapanas Nomor 9 Tahun 2023 merupakan peraturan yang dibentuk sebagai respons cepat adanya peraturan presiden yang menyuatkan penyelenggaraan cadangan pangan pokok untuk masyarakat. Tujuan adanya peraturan ini sebagai acuan pemerintah daerah menyalurkan cadangan pangan pokok sesuai dengan ketentuan data masyarakat yang telah disepakati bersama. Bapanas selaku badan yang bertanggung jawab penuh atas penyaluran cadangan pangan pokok menetapkan ketentuan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengingat setiap kebijakan tentunya memiliki celah kesalahan yang perlu segera diperbaiki. Ketentuan juga dapat berguna

sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyaluran cadangan pangan pokok.

**c. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65.A Tahun 2021 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Kebijakan pemerintah daerah atas dasar pemerintah pusat yang menyuarakan penyelenggaraan cadangan pangan pokok. PerWal daerah kota Bekasi ini menerangkan bahwa penyaluran cadangan pangan pokok merupakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang bertujuan mengatasi menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat. Sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat terkait penerimaan penyaluran cadangan pangan pokok, pemerintah kota Bekasi memfokuskan kepada rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan. Kategori penerimaan bantuan dalam bentuk pangan pokok kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga yang signifikan serta terjadinya inflasi (kenaikan lebih dari 25%) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 bulan berturut-turut. Selain masyarakat yang terdampak inflasi, masyarakat yang berada di daerah kelurahan dan kecamatan yang termasuk rumah tangga miskin dan tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan menerima sasaran cadangan pangan pokok.

Beras sebagai salah satu jenis cadangan pangan pokok yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat diperlukan adanya mekanisme tepat dalam penyediaan dan penyalurannya. Sebagai bentuk kerja sama pemerintahan, dinas daerah bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan menjadi organisasi pelaksana mekanisme tersebut. Dalam melaksanakan mekanisme penyediaan, ketentuan beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kota merupakan kualitas medium dengan kadar air

maksimum 14% butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2%, derajat sosoh minimum 95%. Keperluan menjaga cadangan pangan pokok sesuai dengan mutu dan standar berlaku diperlukan adanya rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan. Mekanisme yang dijalankan seperti halnya secara periodik menyesuaikan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan. Selain itu, pembelian bahan pangan dilakukan hanya dari Toko Tani Indonesia maupun Bulog daerah.

Ketika ketentuan penyediaan telah tercapai, adanya ketentuan mekanisme penyaluran kepada masyarakat sebagai bentuk acuan dinas daerah dalam memberikan cadangan pangan pokok. Penyaluran dilakukan dengan memberikan minimal 2,5% dari jumlah pangan yang tersedia. Mekanisme yang akan berjalan melalui pendataan masyarakat terlebih dahulu yang dilakukan oleh kelurahan atau kecamatan dan diserahkan kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas daerah. Setelah adanya data yang sesuai dengan kebutuhan, dinas daerah dapat melakukan pendistribusian kepada masyarakat melalui kelurahan. Sebagai bentuk tanggung jawab penyaluran cadangan pangan pokok kepada masyarakat, kelurahan berkewajiban untuk melakukan pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat. Kelurahan akan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada setiap sasaran Penerima sebagai bentuk tanggung jawab kepada dinas daerah.

Keberhasilan penyaluran cadangan pangan pokok diukur dan dapat dilihat melalui 3 indikator yaitu indikator *outcome*, indikator *benefit*, dan indikator *impact*. Melalui indikator *outcome* pemerintah menargetkan terpenuhinya ketersediaan dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan dari sisi indikator *benefit* pemerintah menargetkan terbangunnya pengelolaan

kelembagaan cadangan pangan pokok yang mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan penyaluran cadangan pangan pokok tentu saja untuk membuat tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu sebagai bentuk keberhasilan melalui indikator *impact*.

Langkah Awal dalam mengatasi sebuah ketimpangan sosial adalah dengan membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi sekelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Peraturan pusat maupun peraturan daerah terkait penyelenggaraan cadangan pangan pokok untuk masyarakat miskin menjadi solusi yang tepat diterapkan pada masing-masing daerah. Ketentuan dalam masing-masing peraturan menjelaskan secara rinci penjelasan mulai dari jenis pangan sampai kepada ketentuan pangan yang harus diberikan kepada masyarakat. Mekanisme atau tahapan tidak luput diberikan ketentuan yang tegas, dimulai dari tahapan pengadaan, pengelolaan, sampai kepada tahapan penyaluran cadangan pangan pokok. Ketertarikan peneliti terhadap penelitian saat ini mengacu pada tahapan penyaluran cadangan pangan pokok di Kota Bekasi. Terjadinya banyak keluhan masyarakat yang belum diketahui penyebabnya, salah satu yang menjadi menarik adalah ketika masyarakat penerima manfaat tidak mendapatkan cadangan pangan pokok yang diberikan. Data kelurahan yang sudah akurat, tidak sesuai dengan fakta lapangannya, sehingga mengakibatkan kesalahan data penerima manfaat cadangan pangan pokok.

## **2. Tinjauan Teori**

Fokus penelitian yang akan melihat kepada implementasi kebijakan memerlukan penguatan khusus terhadap makna mendalam dari administrasi publik, kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan, Implementasi kebijakan publik, hingga kepada komunikasi kebijakan publik.

### a. Administrasi Publik

Administrasi publik salah satu ilmu pengetahuan yang bergerak memberikan ketepatan dan kecermatan dalam mengelola pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat (publik). Segala sesuatu hal yang erat kaitannya dengan konteks kepentingan publik dan urusan publik menjadi tempat utama ilmu administrasi publik berjalan. Kegiatan merencanakan, mengatur, mengawasi, hingga evaluasi menjadi kegiatan pemerintah dalam ilmu administrasi publik untuk menjalankan dan menerapkan kebijaksanaan dalam program-program kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara lebih mendalam terkait administrasi publik, etimologi kata administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “ad” dan “*ministrate*” yang memiliki arti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan etimologi dari kata publik berasal dari bahasa inggris “public” yang berarti umum, masyarakat atau negara. (Pasolong, 2013). Menurut Leonard D. White dalam Kencana (2006) administrasi adalah “suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer dan baik ukuran besar maupun kecil.” Sedangkan menurut Ibrahim, (2007)

“Definisi dari administrasi publik menurut sejumlah ahli menafsirkannya sebagai seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.”

Adapun menurut Pasolong (2007) menafsirkan bahwa “administrasi publik sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-



tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.”

Makna penafsiran administrasi publik tidak semata sebatas melayani atau pelayanan. Keberadaan administrasi publik yang selalu ada dalam organisasi menemui arti yang luas, sehingga muncul konsep pemerintahan yang baik. Adanya dorongan masyarakat yang semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kompetensinya menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan negara yang baik. United Nations Development programme (UNDP) merincikan sistem pemerintah yang baik dengan mengusung 9 prinsip yang diperlukan yaitu “akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategi, responsive, dan yang terakhir berorientasi pada konsensus.” (UNDP, 1997)

Pemerintah yang baik akan merujuk kepada birokrasi yang memiliki arti penyediaan pelayanan publik. Keberadaan birokrasi dalam pemerintahan yang baik berfungsi sebagai “pegawai negeri sipil”. Sejalan dengan hal tersebut, definisi menurut Gordon dalam Nugroho (2012), menyatakan “Posisi administrasi publik berada pada segala proses, organisasi, dan individu yang berkenaan dengan implementasi peraturan yang dibuat atau diterima oleh legislatif, eksekutif, dan kehakiman.”

#### **b. Kebijakan Publik**

Kata *public policy* (kebijakan publik) masih menjadi 2 kata yang memiliki makna berbeda-beda pada setiap tempatnya. Secara pasti terdapat 2 penafsiran yang signifikan yaitu kebijaksanaan publik dan kebijakan publik. Kedua kata tersebut mengandung arti yang berbeda, seperti halnya kebijaksanaan yang mengandung makna sifat-sifat atau karakter yang melekat pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Secara konteks dan kontennya, kebijaksanaan

merupakan alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lain untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan. Sedangkan menurut S. Woyowasito dan W.J.S Purwodaminto, kebijakan berasal dari kata “bijak” yang merupakan kata sifat yang selanjutnya mendapat tambahan di awal dan di akhir sehingga menjadi kata benda “kebijakan”. Secara konteks dan kontennya kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas. Sedangkan Malone, (2014) mengemukakan bahwa :

“Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai kerangka kerja keseluruhan tentang tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan publik, studi tentang keputusan pemerintah dan tindakan yang dirancang untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Kebijakan secara garis besar merupakan tindakan yang bertujuan dan dirancang sebagai tanggapan terhadap masalah yang dirasakan.”

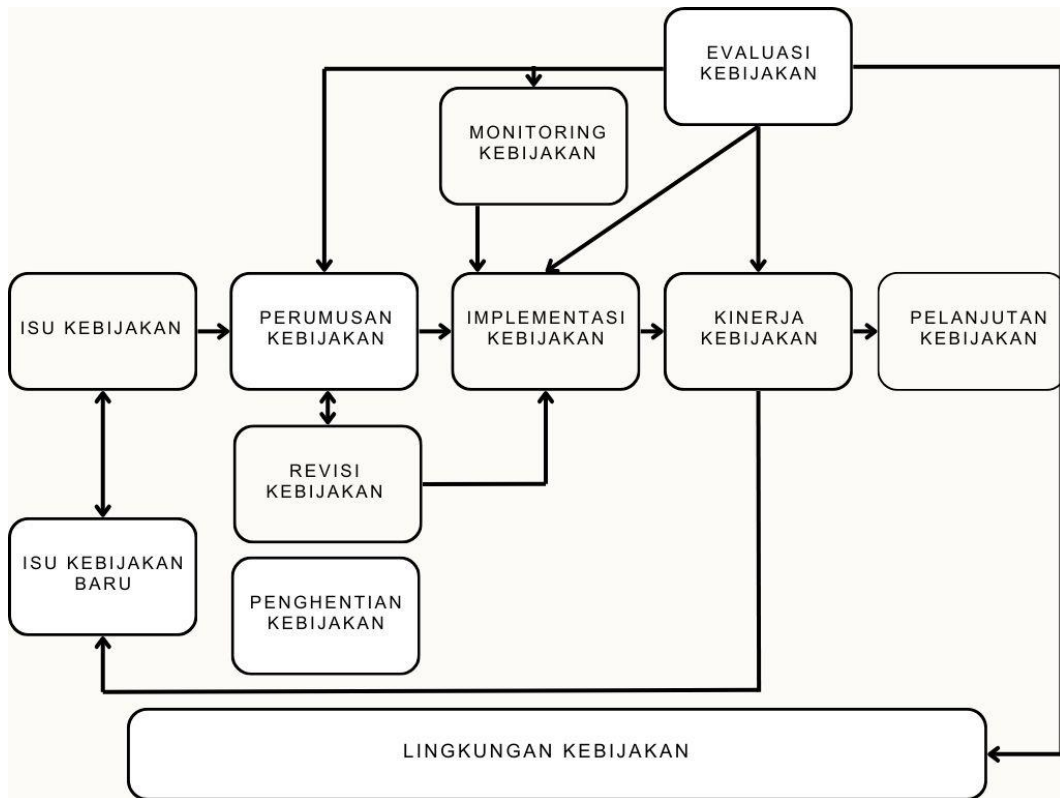
Seorang ilmuwan Kraft & Furlong (2004, 4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“A course of government action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention.”* Mereka menempatkan kebijakan publik sebagai respons terhadap masalah sosial. Dimana kondisi yang dianggap tidak dapat diterima masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan definisi kebijakan publik, pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka merespons realitas sosial masyarakatnya demi tercapainya kebaikan dalam arti luas. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya memiliki pemahaman konsep kebijakan publik secara maksimal, permasalahan terhadap rumah

tangga miskin menjadi masalah sosial yang tepat dijadikan pembuatan kebijakan demi terciptanya kebaikan bersama.

Keberadaan kebijakan publik tentunya memiliki banyak tujuan yang mengarah baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Pemahaman terkait tujuan kebijakan publik dapat dilihat dari sisi tujuan *distributif* berlawanan dengan tujuan *absortif*. Tujuan kebijakan *absortif* merupakan kebijakan yang menyerap sumber daya terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. (Kolb, 1978: 226). Contoh tujuan kebijakan *absortif* seperti halnya kebijakan perpajakan negara yang menghimpun pendapatan untuk negara dan kemudian didistribusikan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Pemahaman tujuan kebijakan kedua terkait dengan *distributif* yaitu kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber-sumber daya material ataupun non material ke seluruh masyarakat (Kolb, 1978:226). Contoh dari tujuan kebijakan *distributif* adalah pemberian kewenangan dari daerah atau otonomi daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumber daya.

Terciptanya kebijakan publik yang baik, terdapat mekanisme panjang yang melibatkan banyak aspek di dalam pembuatannya. Menurut Dr. Riant Nugroho (2012: 185) dalam bukunya terdapat 4 tahapan dalam pemahaman proses kebijakan. Yaitu “dimulai dari proses isu kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan terakhir evaluasi kebijakan.”



**Gambar 2.1 Tahapan Proses Kebijakan publik**

*Sumber: Buku Riant Nugroho 2012*

Tahapan pertama berkaitan dengan isu kebijakan yang mengartikan bahwa permasalahan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya bersifat jangka panjang, dan tidak dapat diselesaikan orang-seorang. Isu kebijakan memiliki 2 jenis yaitu *problem* dan *goal*, kedua jenis isu tersebut bisa menjadi orientasi dari kebijakan publik. Dimana jenis isu kebijakan yang beranjak dari *problem* mengartikan bahwa kebijakan publik dapat berangkat dari permasalahan yang muncul pada kehidupan publik. Sedangkan jenis isu *goal* mengartikan bahwa kebijakan publik dapat berangkat dari tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik.

Setelah munculnya isu kebijakan, pemerintah bergerak untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan

masalah tersebut. Pada tahap ini para pembuat kebijakan menyusun strategi tepat seperti apa yang menjadi permasalahan, bagaimana solusi yang dapat dijadikan rekomendasi, serta menentukan siapa saja yang akan menjadi sasaran atas kebijakan yang akan dibuat. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya. Tahapan selanjutnya terkait pelaksanaan kebijakan publik, memperkenalkan kebijakan yang telah disahkan kepada sasaran yang dituju. Dalam tahapan implementasi kebijakan dilakukan pemantauan atau *monitoring* untuk memastikan implementasi konsisten dengan rumusan kebijakan. Hasil dari serangkaian tahapan implementasi kebijakan terdapat kinerja kebijakan. Pada saat muncul kinerja kebijakan, tahapan evaluasi sangat diperlukan untuk dapat melihat seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan.

Proses pembuatan kebijakan menjadi salah satu kunci penting yang perlu diperhatikan terlepas dari pengaruh intervensi dari politik. Seorang pembuat kebijakan tentunya paham pelaksanaan atau implementasi kebijakan menjadi tahapan krusial, mengingat banyak kejadian yang tidak dapat diperkirakan ketika kebijakan sudah terlaksana di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketika kebijakan publik yang ditujukan untuk masyarakat tidak tepat sasaran atau tujuan sesuai dengan rumusan kebijakan dibentuk.

### **c. Implementasi Kebijakan Publik**

Suatu tahapan proses kebijakan publik yang ditujukan kepada sasaran kebijakan dengan memperhatikan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Definisi dari implementasi memiliki cakupan sangat luas tergantung pada pendekatan yang dipergunakan. Menurut

Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) “Pendekatan implementasi kebijakan dibedakan menjadi 3 generasi.” Generasi pertama terjadi pada tahun 1970-an yang berkaitan erat dengan masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya, dimana implementasi kebijakan publik berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi pertama dipelopori oleh Graham T. Allison dengan studi kasus misil Kuba (1971, 1979).”

Generasi kedua merupakan generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (*Top-Down*). Perspektif yang berkembang pada tahun 1980-an ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Pendekatan *top-down* banyak dikembangkan oleh beberapa ilmuwan seperti Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983), dan Paul Berman (1980). Generasi Ketiga terjadi di tahun 1990-an, pendekatan yang memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Malcolm L. Goggin (1990) merupakan seorang ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan tersebut.

Ketiga generasi yang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda pada setiap generasinya menjadikan model-model implementasi kebijakan mempunyai pandangan berbeda. Model-model tersebut tidak hanya berfokus pada sisi pelaksanaannya saja, tetapi aspek-aspek lain sangat berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan publik. Seperti halnya generasi pertama yang memiliki fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat.

Beragam model telah dikembangkan ilmuwan-ilmuan terdahulu untuk dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Keberadaan generasi pertama yang perlu memaksimalkan implementor dalam mengimplementasikan kebijakannya, seperti model Van Meter dan Van Horn (1975), salah satu model implementasi kebijakan generasi pertama yang mengatakan implementasi kebijakan merupakan

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Model yang paling klasik ini menggambarkan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Variabel yang digunakan dalam mempengaruhi kebijakan publik adalah

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- 2) Karakteristik agen pelaksana/implementor
- 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- 4) Kecenderungan pelaksana/implementor

Variabel tersebut akan membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya.

Model Mazmanian dan Sabatier merupakan contoh generasi pertama yang dikembangkan pada tahun 1983, beliau mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan

“Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin

dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.”

Pada intinya Mazmanian dan Sabatier menjelaskan implementasi kebijakan publik untuk dapat memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Model yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier biasa disebut sebagai model kerangka analisis Implementasi (*A framework for implementation analysis*). Variabel yang digunakan dalam mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan adalah

- 1) Variabel Independen
- 2) Variabel intervening
- 3) Variabel dependen

Variabel yang digunakan menyuarakan sebuah pengakuan bahwa meskipun formulasi kebijakan telah dirumuskan melalui proses yang sesuai dengan kaidah, konflik maupun persuasi tidak berarti para *stakeholders* yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut menghentikan desakannya ketika implementasi kebijakan sedang dilaksanakan.

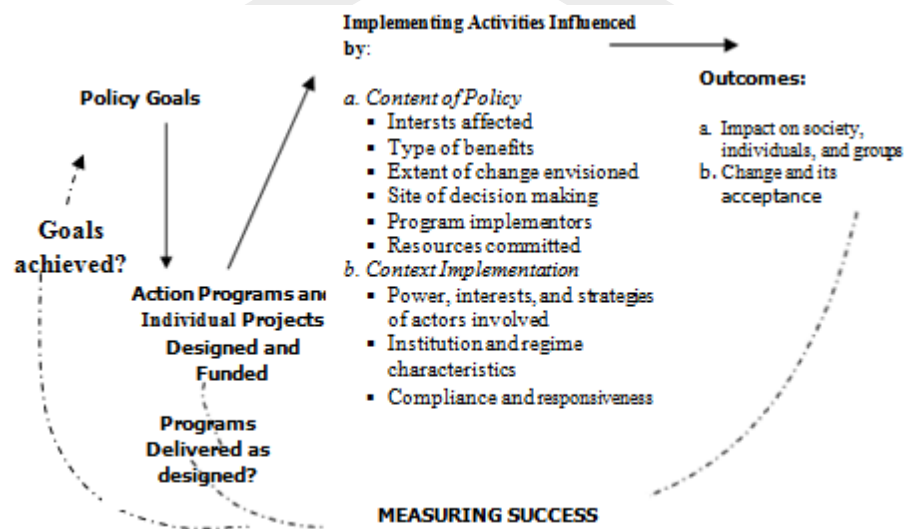
Model Grindle (1980) merupakan model implementasi kebijakan publik generasi pertama yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980). Beliau mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan

“Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

Pendekatan model Grindle (1980) dikenal dengan nama (*Implementation as A Political and Administrative Process*). Dalam



model Grindle (1980) terdapat keunikan pada pemahamannya yang komprehensif terhadap konteks kebijakannya. Secara khusus keunikan tersebut menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi antara para aktor implementasi.



Gambar 2.2 Teori Implementasi Grindle

Sumber: Buku Leo Agustina, Ph.D. 2017

Merilee S. Grindle (1980) dalam buku public policy karangan Riant Nugroho (2012), mengatakan bahwa “keberhasilan Model Implementasi Grindle (1980) ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.” Dalam konteks implementasinya terdapat 4 aspek yang dapat mempengaruhinya yaitu

1) *Kekuasaan (Power)*

Dalam konteks implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980), konsep kekuasaan (*power*) merujuk pada kemampuan atau otoritas untuk memengaruhi atau mengubah perilaku, keputusan, atau tindakan orang lain dalam konteks

proses implementasi kebijakan publik. Kekuasaan (*power*) menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi dinamika implementasi kebijakan dan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat.

- 2) Strategi kepentingan dari aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).

Aspek kedua merujuk pada upaya dari berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk mempengaruhi proses implementasi kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Aspek model Grindle (1980) mengakui bahwa berbagai aktor dalam konteks implementasi kebijakan memiliki kepentingan yang beragam dan sering bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka menggunakan berbagai strategi untuk melindungi, mempromosikan, atau memperjuangkan kepentingan mereka.

- 3) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).

Aspek ketiga mengartikan bahwa ciri-ciri atau atribut-atribut yang dimiliki oleh lembaga-lembaga dan rezim-rezim politik dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Aspek ketiga memfokuskan bahwa karakteristik dari lembaga-lembaga pemerintah dan kondisi politik dalam sebuah negara memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana kebijakan diimplementasikan.

- 4) Kepatuhan dan Respons (*compliance and responsiveness*).

Aspek keempat melihat dua variabel yang penting dalam menganalisis implementasi kebijakan publik. Kepatuhan dan Respons akan menyoroti bahwa dalam proses implementasi kebijakan, para pelaksana kebijakan yang berasal dari pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat sipil harus dapat

memenuhi dua tuntutan utama, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang ditetapkan, serta daya tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan yang muncul dari lingkungan sekitarnya.

Melalui variabel Grindle (1980) implementasi kebijakan akan dianalisis, sehingga penelitian akan memberikan gambaran apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, variabel Grindle (1980) juga akan memberikan gambaran apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

## **B. Konsep Kunci**

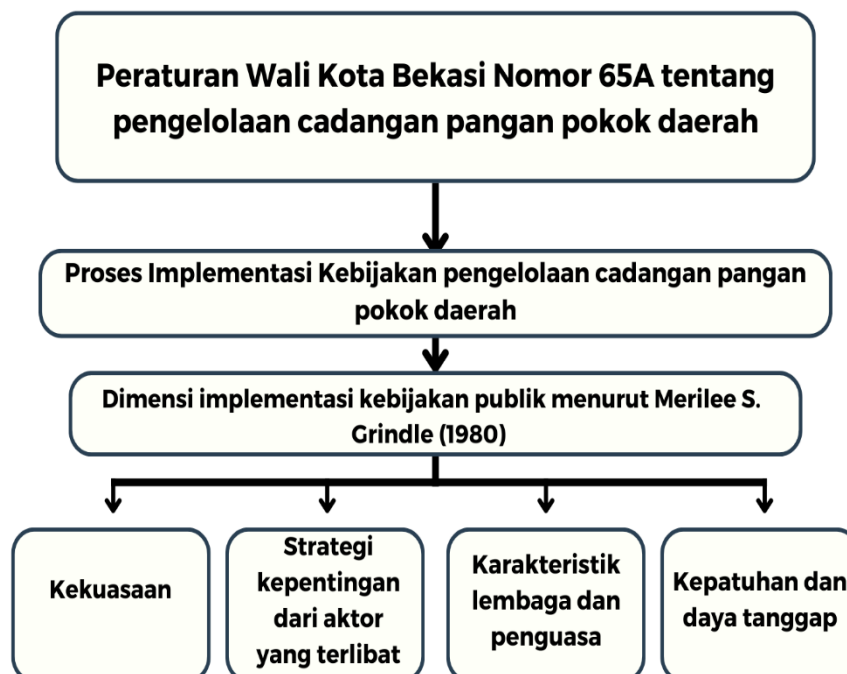
Pada penelitian ini yang menjadi konsep kunci adalah Implementasi Kebijakan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok. Adapun yang dimaksud dengan Implementasi Kebijakan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok adalah penerapan kebijakan penyaluran persediaan pangan yang di kelola pemerintah untuk dapat menanggulangi kekurangan pangan di masyarakat untuk menghadapi krisis pangan di masyarakat di kota Bekasi. Adapun indikator implementasi yang dipergunakan adalah 1.) Kekuasaan (Power), 2.) Strategi kepentingan dari aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*), 3.) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*). 4.) Kepatuhan dan Respons (*compliance and responsiveness*). Merilee S.Grindle (1980). Adapun pengertian lain yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan masyarakat yang terkena bencana.

2. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka merespons realitas sosial masyarakatnya demi tercapainya kebaikan dalam arti luas.
3. Analisis implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk mengkaji proses pelaksanaan suatu kebijakan publik menggunakan variabel atau indikator yang telah ditetapkan.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengambil landasan dari Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65A Tahun 2021 mengenai penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah pada saat proses implementasi kebijakan dijalankan. Oleh karena itu dalam kerangka berpikir ini terdapat dimensi implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle (1980) seperti kekuasaan, Strategi kepentingan dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tangkap pelaksana. Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini:



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Merilee S.Grindle (1980)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu studi penelitian, peneliti perlu mengadopsi metode penelitian yang sesuai dan relevan, sebagai arahan panduan yang tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian berpengaruh besar dalam menentukan bagaimana dan dengan teknik apa peneliti menggali informasi secara langsung pada informan dan lokus yang telah ditetapkan. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu studi penelitian, karena menentukan langkah-langkah yang harus diikuti oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Tanpa metode penelitian yang tepat, sesuai dengan tujuan, jenis, dan sumber data penelitiannya, maka penelitian tersebut dapat mengalami berbagai permasalahan kedepannya. Oleh karena itu, menjadi penting pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat dan sesuai sejak awal penelitian. Menurut Nasution, (2023).

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.”

Menurut Creswell dalam Mulyadi et al., (2019) penelitian kualitatif merupakan

“Suatu proses untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah.”

Sedangkan menurut Fiantika, (2022) menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan

“Pengetahuan dibangun peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari

subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut.”

Pendekatan ini juga dilakukan dengan metode deskriptif, berdasarkan Morissan (2019) memberikan pengertian yaitu “Mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, meneliti pada suatu konteks khusus yang alamiah.” Penelitian dengan metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu fenomena atau kondisi sosial tertentu dengan cara yang mendalam dan holistik. Pada konteks penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk mengangkat keadaan, fakta, dan fenomena yang ada dalam implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya Kota Bekasi, sehingga peneliti mampu memahami situasi sosial secara mendalam. Metode deskriptif kualitatif digunakan peneliti pada penelitian ini untuk dapat melihat fenomena yang berasal dari pengalaman objek seseorang dapat menggali informasi lebih dalam terkait implementasi kebijakan cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, apa kendala dan upaya yang dilakukan, serta apa dampak bagi masyarakat telah sesuai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah ada faktor politis yang melatarbelakangi dalam implementasinya untuk kemudian menafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, indikator analisis implementasi dari teori yang digunakan. Sehingga metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berfokus pada pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi secara mendalam terhadap pengalaman dan pandangan para informan yang terlibat dalam kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya Kota Bekasi. Pendekatan kualitatif dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, apa dampaknya bagi

ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut. Dengan demikian, pendekatan kualitatif bisa menjadi instrumen yang kuat dalam menganalisis implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok, yang merupakan salah satu strategi ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks penelitian ini, menekankan pada pemahaman makna daripada upaya generalisasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini ditandai dengan pengumpulan data yang tidak hanya dipandu oleh teori, tetapi juga oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yang berarti dibangun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis yang kemudian dapat diperluas atau dikembangkan lebih lanjut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis sering kali muncul sebagai hasil dari analisis data, bukan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Oleh karena itu, fokus utama penelitian kualitatif adalah pada pemahaman mendalam terhadap fenomena mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi.

Analisis data yang bersifat induktif mengarah pada fokus yang lebih besar pada pengembangan temuan dari data yang terkumpul daripada pada penerapan struktur atau teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk menyelami dan memahami secara mendalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi tanpa terikat pada teori atau kerangka tertentu. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika lapangan, mengidentifikasi pola-pola

yang muncul, serta mendapatkan perspektif baru yang mungkin belum terungkap sebelumnya. Pendekatan analisis induktif ini akan memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih holistik dan kontekstual terkait dengan implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk data primer yang diperoleh langsung dari informan terpilih yang memiliki pengetahuan dan peran penting dalam implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur seperti peraturan, buku, jurnal, dan artikel terkait yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk membentuk sebuah set data penelitian yang berkualitas baik, memiliki keaslian, keandalan, keakuratan, serta relevansi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Berikut ini diberikan informasi mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

### **1. Wawancara**

Menurut Berg, Rubin & Rubin dalam Nashrullah et al., (2023) Wawancara merupakan “salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber secara tatap muka untuk melakukan tanya jawab.” Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, metode wawancara juga dapat dilakukan melalui media-media tertentu seperti telepon, *email*, atau video call



menggunakan *platform* seperti *zoom* atau *skype*. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam dari narasumber tanpa harus bertatap muka secara fisik, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan data.

Dalam konteks penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan para informan atau narasumber yang berperan dalam menyediakan data yang relevan dan rinci terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan serta peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan kelurahan Mustikajaya. Dalam penelitian ini, pemilihan informan merupakan aspek penting dan memainkan peran krusial dalam memastikan data yang diperoleh valid dan relevan terhadap topik penelitian. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih informan yang memiliki pengalaman langsung dalam implementasi kebijakan serta memiliki otoritas atau kewenangan yang relevan dalam konteks pelaksanaan kebijakan di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Metode pemilihan informan ini dipilih untuk memastikan representasi yang memadai dari berbagai perspektif dan pengalaman terkait dengan implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di kelurahan Mustikajaya, kota Bekasi. Berikut adalah informan yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi, terkait dengan analisis implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi:

Tabel 3.1  
Daftar informan penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Kelurahan Mustikajaya	1
2	Sekretaris Kelurahan Mustikajaya	1
3	Seksi Bagian Kesejahteraan Sosial	1
4	Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1
5	Satuan tugas pemantauan dan monitoring kelurahan Mustikajaya	2
6	Masyarakat penerima penyaluran cadangan pangan pokok kelurahan Mustikajaya	2
Total		8

*Sumber:* Diolah peneliti, 2024

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh informasi terkait dengan analisis implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Menurut Hikmawati (2020), “Terdapat tiga jenis wawancara yang umum digunakan, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tak berstruktur.” Wawancara terstruktur, atau yang sering disebut sebagai wawancara terkendali, melibatkan penggunaan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada para informan, yang didasarkan pada kategori-kategori jawaban tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan wawancara terstruktur memungkinkan untuk pengumpulan data yang lebih sistematis dan terkendali, dengan membatasi variasi jawaban sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara tidak terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk menjaga fleksibilitas dalam alur atau perkembangan topik wawancara. Meskipun berpegang

pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan secara dinamis, dengan tujuan untuk menggali dan menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Penelitian dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Dalam konteks ini, peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam berbagai aspek yang mungkin muncul selama proses implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Selain itu, wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang terkait dengan pengalaman, pandangan, dan pemahaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok. Dengan demikian, melalui pendekatan wawancara tidak terstruktur, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang komprehensif tentang dinamika, tantangan, dan dampak dari implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di wilayah Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi.

## 2. Observasi

Menurut Saputra (2022) Teknik observasi merupakan “Metode pengamatan yang dilakukan ketika peneliti sudah terjun ke lapangan.” Sedangkan menurut Nashrullah (2023) “Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.” Dalam konteks penelitian ini teknik observasi akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan tersebut di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi mengenai implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok. Dengan terlibat langsung dalam

pengamatan, peneliti dapat mengidentifikasi secara langsung proses, interaksi, dan dinamika yang terjadi di sekitar implementasi kebijakan, serta menangkap berbagai permasalahan atau tantangan yang mungkin timbul. Melalui kombinasi teknik observasi dengan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, penelitian ini akan dapat menyajikan analisis yang holistik dan mendalam tentang implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya.

### 3. Dokumentasi

Wahidmurni dalam Sidiq & Choiri, (2019) mengatakan bahwa “Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data tidak langsung, adalah upaya untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau rekaman yang relevan dengan penelitian, tanpa perlu berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.” Dokumen yang menjadi objek penelitian dapat beragam, mulai dari dokumen resmi seperti surat putusan dan surat instruksi, hingga dokumen tidak resmi seperti surat nota atau surat pribadi yang mungkin memberikan informasi tambahan tentang suatu peristiwa atau situasi. Dalam konteks penelitian ini teknik dokumentasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendekatan kualitatif yang melengkapi metode observasi dan wawancara.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen dan data-data terkait yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti keputusan-keputusan resmi terkait kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok, catatan-catatan tertulis mengenai pelaksanaan kebijakan, dan mungkin juga surat-surat atau dokumen lain yang memberikan konteks tambahan. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengeksplorasi isu-isu yang relevan dengan penelitian. Melalui pendekatan ini, studi dokumentasi diharapkan dapat memberikan dukungan tambahan dan memperkuat bukti-bukti terkait dengan

implementasi kebijakan tersebut, serta menambah kepercayaan terhadap kesahihan hasil penelitian secara keseluruhan.

### C. Instrumen Penelitian

Abubakar, (2021) menerangkan bahwa “Instrumen penelitian menjadi alat yang memfasilitasi peneliti dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data agar lebih mudah dan berjalan lancar.” Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dengan demikian, peran peneliti sebagai instrumen utama sangat penting dalam memahami secara mendalam berbagai aspek terkait implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di wilayah Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Dalam rangka penelitian ini, alat atau instrumen yang diterapkan adalah pedoman wawancara yang berisi serangkaian pertanyaan terbuka yang membimbing dialog antara peneliti dan narasumber. Melalui penggunaan instrumen ini, peneliti dapat mengoptimalkan proses pengumpulan data dan memastikan bahwa data yang diperoleh berkualitas dan relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut Abubakar (2021) pedoman wawancara adalah “Suatu daftar yang berisi sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti guna diajukan kepada informan atau responden untuk memperoleh jawaban guna mendapatkan data penelitian.” Pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman pada saat melakukan wawancara agar pertanyaan tidak mengambang, dan lebih terarah supaya memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan peneliti. Secara umum, terdapat dua jenis pedoman wawancara yang digunakan dalam suatu penelitian. Menurut Sidiq & Choiri (2019), memberikan penjelasan terkait dua jenis pedoman wawancara yaitu:

“1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yang hanya memberikan garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Dalam hal ini, peran kreativitas pewawancara sangat penting dalam mengembangkan pertanyaan yang relevan dan mendalam. 2) Pedoman wawancara terstruktur, yang disusun dengan detail dan menyerupai *checklist* yang terperinci.”

Dalam konteks penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk semi-terstruktur yang juga paling banyak digunakan dalam suatu penelitian. Pada jenis pedoman ini, pewawancara mengawali dengan pertanyaan yang telah terstruktur, namun kemudian mendalami setiap topik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pendekatan ini memastikan bahwa semua variabel atau indikator yang relevan dibahas secara komprehensif, dengan mendapatkan keterangan yang lengkap dan mendalam dari para informan atau narasumber.

Instrumen penelitian selanjutnya yang digunakan oleh peneliti, yakni kebutuhan akan alat bantu sebagai pendukung yang memastikan kelancaran proses penelitian. Alat-alat tersebut mencakup buku catatan, laptop, handphone, dan pedoman wawancara. Penggunaan buku catatan memungkinkan peneliti untuk mencatat observasi, catatan lapangan, dan refleksi secara langsung selama kegiatan lapangan. Laptop digunakan untuk analisis data, penyusunan laporan, dan menyimpan dokumen-dokumen penting terkait penelitian. Handphone berfungsi sebagai alat komunikasi dengan narasumber atau pemangku kepentingan, dan juga dapat digunakan untuk mengakses informasi secara online, serta sebagai alat perekam dalam proses wawancara atau interaksi penting selama proses penelitian.

Selain alat bantu, persiapan aspek-aspek lainnya juga sangat penting, adalah pemahaman yang mendalam tentang bidang studi yang sedang diteliti, termasuk kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya. Selain itu, kesiapan peneliti untuk masuk ke dalam lingkungan penelitian, baik secara akademis maupun logistik, juga menjadi faktor kunci. Ini mencakup persiapan mental, pemahaman tentang etika penelitian, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan baru. Dengan mempersiapkan semua aspek ini dengan baik, peneliti dapat memastikan kelancaran proses penelitian dan mendapatkan data yang berkualitas untuk dianalisis lebih lanjut.

## **D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Dalam rangka menganalisis hasil penelitian ini pengolahan data merupakan tahapan penting yang melibatkan serangkaian proses untuk memastikan keakuratan dan keteraturan data yang dikumpulkan. Menurut Sinthania, (2022) “Proses pengolahan data melibatkan beberapa langkah, termasuk pengecekan kebenaran data, penyusunan data, klasifikasi data, dan koreksi jawaban wawancara yang mungkin kurang jelas.” Langkah pertama adalah pengecekan kebenaran data, di mana peneliti memeriksa keakuratan dan kevalidan data yang terkumpul untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, data disusun dan diatur sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan untuk mempermudah analisis selanjutnya. Proses klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan informasi yang serupa atau memiliki keterkaitan sehingga memudahkan dalam proses analisis. Selain itu, dalam tahapan ini juga dilakukan koreksi terhadap jawaban wawancara yang mungkin kurang jelas atau tidak lengkap. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis nantinya dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif terkait dengan implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di wilayah Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Secara keseluruhan, pengolahan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyusun data secara terstruktur dan akurat sehingga memudahkan tahap analisis lebih lanjut.

Dalam proses pengolahan data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini. Menurut Haryoko (2020)

“Triangulasi adalah sebuah pendekatan penelitian yang menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda dan independen untuk mengumpulkan informasi yang saling mendukung dan memperkuat validitas penelitian.”

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi, dimensi atau atribut yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen domain yang diteliti akan dapat diidentifikasi dan diverifikasi melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Dengan kata lain, triangulasi data memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi dan memvalidasi temuan atau informasi yang ditemukan.

Penggunaan triangulasi data memungkinkan peneliti untuk melihat suatu fenomena atau masalah dari berbagai perspektif, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Teknik triangulasi data biasanya melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang digunakan secara bersamaan atau secara berurutan untuk mengkonfirmasi temuan yang ditemukan. Sedangkan menurut Tohirin (2012) jenis-jenis Triangulasi terdiri dari:

- a. “Triangulasi Sumber: Jenis ini melibatkan penggunaan beberapa sumber data untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi temuan penelitian. Dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda, peneliti dapat memastikan keabsahan dan keandalan temuan yang ditemukan.
- b. Triangulasi Metode: Triangulasi metode melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda untuk memvalidasi hasil penelitian. Dengan menggunakan lebih dari satu metode, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti dapat memastikan keabsahan temuan serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek penelitian.
- c. Triangulasi peneliti: Jenis ini melibatkan partisipasi lebih dari satu peneliti atau tim penelitian dalam proses pengumpulan dan analisis data. Melibatkan lebih dari satu peneliti dapat membantu dalam mengurangi bias penelitian serta memastikan kesesuaian temuan.
- d. Triangulasi Teori: Triangulasi teori melibatkan perbandingan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan. Dengan membandingkan temuan dengan kerangka teoritis yang ada, peneliti dapat memperkuat validitas dan generalisabilitas hasil penelitian.”



Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber dan triangulasi metode menjadi jenis triangulasi yang relevan digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi. Triangulasi sumber, dapat menjadi pilihan yang tepat, dengan penggunaan beragam sumber data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen resmi dapat memberikan konfirmasi terhadap temuan-temuan yang ditemukan selama penelitian. Triangulasi metode, yang melibatkan penggunaan lebih dari satu metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen dapat membantu dalam memastikan keabsahan dan keandalan temuan yang ditemukan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di wilayah studi tersebut.

Dengan memadukan berbagai teknik dan sumber data, triangulasi data dapat meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian, serta mengurangi kemungkinan bias atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengumpulan dan interpretasi data. Oleh karena itu, triangulasi data dianggap sebagai pendekatan yang kuat dan efektif untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan triangulasi data dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkualitas dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen resmi terkait kebijakan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai dimensi dan atribut yang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Dengan memadukan berbagai sumber data dan sudut pandang, triangulasi data memungkinkan peneliti untuk memvalidasi temuan-temuan mereka dan menghasilkan

analisis yang lebih kuat serta akurat mengenai proses pelaksanaan kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di wilayah Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi.

## 2. Analisis Data

Menurut Jumiyati, (2022) Analisis data merupakan

“Tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.”

Fiantika (2022) memperkuat pengertian dengan menerangkan “Analisis data juga dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung, hal ini dilakukan untuk menghasilkan data yang valid, menghasilkan temuan baru dan menemukan masalah baru sebagai peluang pengembangan penelitian.” Data yang telah dihasilkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan menjalani proses pengolahan yang mendalam dalam penelitian ini. Misalnya, data wawancara yang direkam melalui rekaman handphone akan diubah menjadi transkrip wawancara, sementara data hasil observasi dan dokumentasi akan diolah dan diberikan deskripsi sebagai keterangan dari hasil tersebut. Pengolahan data ini akan mengikuti model Miles dan Huberman (1992) untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil analisis. Dalam konteks penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi, penggunaan model tersebut sangat relevan karena dapat memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam menganalisis data kualitatif yang terkumpul melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Dengan fokus pada pemrosesan dan analisis kata-kata, data ini akan disiapkan secara cermat sebelum digunakan untuk memperoleh pemahaman yang

lebih mendalam terkait dengan implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok. Berikut adalah uraian lebih mendalam mengenai metode analisis data yang menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dalam Harahap (2020), yakni sebagai berikut:

- a. “Reduksi data. Tahap pertama dalam analisis adalah reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan proses penyaringan, pengelompokan tema, kategorisasi, dan pemfokusan data sesuai dengan bidangnya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah mengeliminasi data yang tidak relevan, menyusun data dalam struktur yang sistematis, dan membuat rangkuman dalam satuan analisis. Setelah proses reduksi selesai, data yang relevan dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah penelitian.
- b. *Display* data (penyajian data). Tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam tahap ini, peneliti menyajikan hasil temuan data dalam bentuk narasi yang jelas. Peneliti menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat, bagan, serta hubungan antar kategori yang disusun secara sistematis dan berurutan.
- c. Penarikan kesimpulan. Meskipun kesimpulan awal mungkin sudah digambarkan pada tahap reduksi data, namun kesimpulan tersebut masih bersifat sementara. Pada tahap ini, kesimpulan yang akhir ditarik berdasarkan bukti-bukti data yang diperoleh secara akurat dan faktual dari lapangan. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Pengkategorian data dilakukan secara tematik, dan kemudian disajikan dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap relevan untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian.”

Secara keseluruhan, proses analisis data dalam penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi, merupakan tahapan yang krusial dalam memahami fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penggunaan model analisis Miles dan Huberman menawarkan pendekatan terstruktur yang relevan, memberikan kerangka kerja untuk menganalisis data kualitatif secara mendalam. Tahap reduksi data mengarah pada pemilahan, pengelompokan, dan

pemfokusan data yang relevan, sedangkan *display* data membantu menyajikan hasil temuan secara jelas dan sistematis. Penarikan kesimpulan kemudian dilakukan berdasarkan bukti-bukti data yang diperoleh secara akurat dan faktual. Penggunaan model Miles dan Huberman (1992) dalam penelitian ini menjadi sangat penting dalam memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam menganalisis data kualitatif dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Dengan fokus pada pemrosesan dan analisis kata-kata, data disiapkan dengan cermat dengan demikian analisis data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan implementasi kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi, serta menghasilkan temuan yang valid dan relevan untuk pengembangan kebijakan dan penelitian lebih lanjut.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

1. Deskripsi atau Gambaran Umum Lokus Penelitian di Kelurahan Mustika Jaya Kota Bekasi

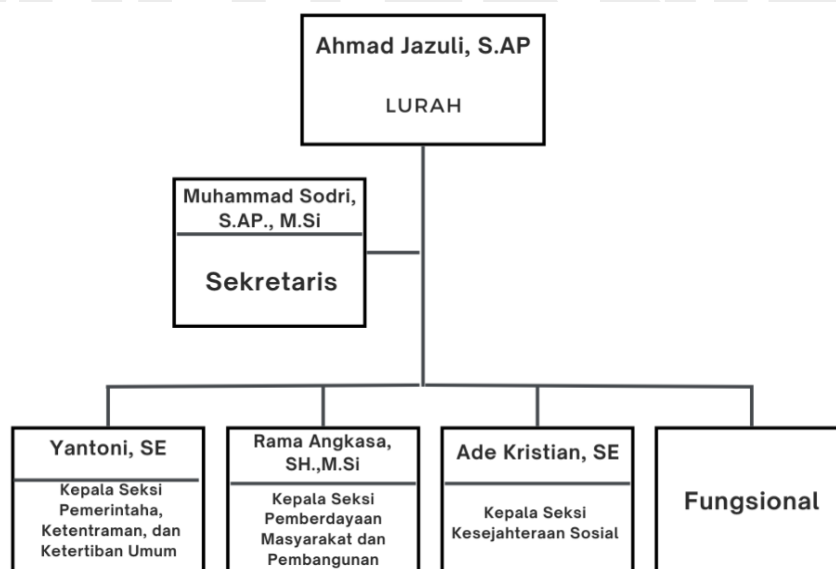
Kelurahan Mustikajaya merupakan salah satu unit administrasi daerah kota Bekasi yang memiliki luas wilayah 930,747 Ha. Secara geografis kelurahan Mustikajaya berada di ketinggian 4-15 MDPL, sehingga suhu yang didapat pada siang hari mencapai 30°C dan suhu di malam hari mencapai 20°C. Kelurahan Mustikajaya mempunyai total 33 RW terdiri dari 209 RT, dengan jumlah penduduk mencapai 74.856 jiwa yang terbagi dalam 22.029 KK. Kelurahan Mustikajaya berbatasan langsung dengan Desa Lambangsari dibagian Timur dan Utaranya, sedangkan dibagian Selatan berbatasan langsung dengan kelurahan Cimuning dan Kelurahan Padurenan, terakhir dibagian Barat berbatasan langsung dengan kelurahan Mustikasari dan Kelurahan Jatimulya.

Sejarah berdirinya Kelurahan Mustikajaya bermula di tahun 1968 perubahan dari desa Babakan Sumur Keramat menjadi Desa Mustikajaya dan masuk kedalam wilayah kecamatan Tambun. Pada tahun 1976 Desa Mustikajaya secara administratif berpindah dari Kecamatan Tambun menjadi masuk wilayah Kecamatan Bantar Gebang. Pada tahun 2002 Desa Mustikajaya beralih menjadi sebuah Kelurahan, yaitu Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Bantar Gebang. Terakhir pada tahun 2005 Kecamatan Bantargebang mengalami pemekaran yang menyebabkan Kelurahan Mustikajaya masuk kedalam bagian wilayah kecamatan Mustikajaya.

Kelurahan Mustikajaya merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan masyarakat cukup pesat, maka dari segi kesehatan kelurahan Mustikajaya memiliki pelayanan puskesmas dan 38

posyandu. Dalam segi pendidikan wilayah kelurahan Mustikajaya memiliki bangunan sekolah total 19 SD, 11 SMP, dan 8 SMA. Adanya peningkatan dukungan pelayanan berpotensi mendorong perekonomian daerah, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM di kelurahan Mustikajaya. Salah satu tradisi budaya yang masih dijalankan adalah adanya kegiatan Adu Bedug Dondang dan festival Tugu Asem, acara tersebut terus dijaga turun temurun oleh masyarakat kelurahan Mustikajaya untuk menuangkan kreativitasnya.

Melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019, kelurahan Mustikajaya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari (1) Lurah, (2) Sekretariat Kelurahan, (3) Seksi yang terbagi menjadi 3 yaitu pertama ada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban; kedua ada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan ketiga ada Seksi Kesejahteraan Sosial, dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Masing-masing Seksi memiliki tugas dan fungsi untuk membantu lurah dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seksi kesejahteraan sosial merupakan seksi yang memegang peranan penting dalam menyejahterakan masyarakat khususnya wilayah kelurahan Mustikajaya. Bidang ini juga menjadi tempat lokus penelitian peneliti yang memiliki 9 fungsi salah satunya ada:

- Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pemberdayaan perempuan
- Pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana
- Pemberian fasilitas pelayanan sosial dan olahraga
- Pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat
- Peningkatan peran serta masyarakat kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Peranan seksi Kesejahteraan Sosial yang menjadi fokus penelitian peneliti terdapat pada penyediaan sarana pemberian bantuan kepada masyarakat, salah satunya adalah bantuan penyaluran cadangan pangan pemerintah.

Pelaksanaan observasi dan wawancara yang dilakukan di kelurahan Mustikajaya diarahkan untuk bertemu dengan bagian seksi Kesejahteraan Sosial. Beberapa aktor yang terlibat dalam membantu setiap program seksi Kesejahteraan Sosial, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), staf seksi yang merangkap menjadi juru bayar, dan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring wilayah (PAMOR). Masing-masing aktor memiliki tugas dan perannya, seperti PSM yang memiliki tanggung jawab sebagai koordinator petugas lapangan. Staf

seksi yang memiliki tanggung jawab memastikan pada saat pelaksanaan pembagian beras sesuai dengan syarat dan ketentuan. Dan aktor PAMOR memiliki tanggung jawab sebagai jembatan informasi dari pihak kelurahan kepada masyarakat. Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pembagian penyaluran cadangan pangan beras kepada masyarakat. Sebagai salah satu tempat dilaksanakannya pembagian penyaluran cadangan pangan beras kepada masyarakat, kelurahan Mustikajaya memiliki banyak interaksi yang terjalin didalamnya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengarah terhadap konteks peranan penting aktor dan lembaga dalam pelaksanaan programnya.

## 2. Data Hasil Penelitian

Program penyaluran cadangan pangan pemerintah berupa beras merupakan program langsung dari pemerintah pusat dan dalam pengawasannya diawasi oleh Kementerian Sosial. Kelurahan Mustikajaya menjadi sosok peranan yang menyelenggarakan penyaluran langsung kepada masyarakat. Program ini ditujukan hanya untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, terdampak musibah, masyarakat yang tergolong tidak mampu, dan lansia. Data penerima manfaat diperoleh dari hasil rekomendasi kelurahan dan akhirnya kementerian sosial yang akan memilah dan memilih sesuai dengan klasifikasi dan kriteria yang tepat. Keterlibatan berbagai aktor dan lembaga menjadi dinamika persoalan tersendiri di kalangan masyarakat, kesesuaian peran dan tanggung jawab menambah pertanyaan besar seperti apa yang terjadi di balik penyelenggaraan program ini, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumen, wawancara dan



observasi kepada para informan Kelurahan Mustikaja sebagai penyelenggara program dan masyarakat sebagai sasaran program serta penerima manfaat program. Hasil penelitian yang telah dikaji kembali menggunakan teori implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) yaitu: (1) Kekuasaan (*Power*), (2) Strategi kepentingan dari aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*), (3) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*), (4) Kepatuhan dan Respons (*compliance and responsiveness*). Keempat aspek tersebut diuraikan sebagai berikut.

**a. Kekuasaan (Power)**

Hasil penelitian aspek kekuasaan erat kaitannya dengan aktor yang terlibat langsung dalam program penyaluran cadangan pangan pokok berupa beras ini. Seperti yang disampaikan *key informant 3*, beliau menyampaikan bahwa :

“Program penyaluran pangan ini bekerja sama dengan kantor pos, kementerian sosial menginstruksikan kepada dinas ketahanan dan dalam penyalurannya bekerja sama dengan kantor pos berikut juga dengan pendistribusian ke wilayahnya, lalu kantor pos mengambil beras pada gudang Bulog yang berada di Karawang, setelah itu kantor pos kirimkan kepada setiap kelurahan. Lalu untuk surat undangannya dikirim langsung oleh kementerian sosial kepada masyarakat melalui satuan tugas pemantauan dan monitoring setiap wilayahnya.”

Dari pernyataan diatas, menjelaskan bahwa banyak aktor-aktor pemerintah pusat yang ikut ambil bagian didalam program penyaluran cadangan pangan. Tidak hanya pemerintah pusat yang berperan tetapi pemerintah daerah sampai kepada lingkup kecil memiliki bagian dan perannya. Seperti yang disampaikan *key informant 4* menyampaikan bahwa:

“Yang pasti adalah pertama orang kelurahan adanya di si kesos, dan pamor. Untuk pelaksananya di mustikajaya petugas lapangan ada namanya PSM, kebetulan saya sendiri sebagai koordinator lapangan yang bertugas sebagai juru transaksi.

Tidak hanya saya, ada 4 orang lagi yang sama seperti saya membantu tugas tersebut.”

Pernyataan yang diutarakan *key informant* 4 menjelaskan aktor yang terlibat di kelurahan Mustikajaya dan diperkuat dengan adanya pandangan dari *key informant* 5, mereka menyatakan bahwa:

*Key informant* 5:

“Jadi yang terlibat dalam penyaluran cadangan pangan pokok itu ada PSM, staff ksesos, pamor, rt rw abis itu masyarakat.”

*Key Informant* 5:

“Jelas yang paling utama adalah masyarakat karena mereka penerima bantuan sosial ini, selanjutnya ada perwakilan masing-masing RW yang memberi dan menerima surat undangan penerima bantuan kepada masyarakat, lalu ada pihak kelurahan terutama bagian kesos dan PSM yang nantinya memberikan secara langsung beras tersebut kepada masyarakat, dan ada petugas kantor pos yang mengirim beras dan surat undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kalau diurutin mulai dari petugas kantor pos diberikan kepada pemerintah daerah yaitu kita sendiri, lalu kita diberitahukan surat undangan tersebut melalui pamor nanti disampaikan kepada RW, lalu RW kasih ke RT dan terakhir diberikan masyarakat melalui RT. tahap terakhir masyarakat datang ke kelurahan kita akan berikan beras tersebut.”

Berdasarkan pandangan dari *key informant* 5, terdapat 5 aktor yang terlibat dalam implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok. Dimulai dari kantor pos yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kelurahan Mustikajaya, lalu dalam pemerintahan daerahnya terdapat aktor PSM, Pamor, dan terakhir RT/RW yang nanti membantu menyelesaikan pelaksanaan implementasi programnya.



**Gambar 4. 2 Suasana Hari Pelaksanaan Penyelenggaraan**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Pernyataan yang dikemukakan beberapa *key informant* sejalan dengan hasil temuan observasi lapangan, dimana ditemukan seluruh aktor sedang berkumpul untuk dapat menyukseskan penyelenggaraan implementasi penyaluran cadangan pangan pokok, seperti hasil dokumentasi yang menunjukkan terdapat aktor kepala seksi bagian kesejahteraan sosial, ketua pekerja sosial masyarakat (PSM), satuan tugas pemantauan dan monitoring (Pamor), dan petugas kantor pos. Dalam dokumentasi tersebut tidak terdapat aktor RT/RW yang mendampingi masyarakatnya di kelurahan Mustikajaya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, banyak ditemukan pandangan yang berbeda-beda, hal ini mengingat kedudukan atau posisi mereka yang berbeda. Pada dasarnya jika disimpulkan, seluruh informasi memiliki keterkaitan saling berhubungan, sehingga aktor yang terlibat dalam program penyaluran cadangan pangan adalah: Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kantor Pos, Kelurahan Mustikajaya, Pamor, PSM, RW, dan RT. Secara keseluruhan aktor-aktor yang terlibat tidak hanya berasal dari pemerintah pusat tetapi

melibatkan pemerintah daerah bahkan sampai dengan wilayah pemerintahan kecil.

**b. Strategi Kepentingan dari Aktor Yang Terlibat (Interest Strategies Of Actors Involved).**

Pemahaman strategi kepentingan berhubungan dengan adanya peran dan tanggung jawabnya. Ketika aktor memiliki peran dan tanggung jawabnya mereka dengan mudah menjalankan strateginya untuk dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara lebih jelas penting untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pada masing-masing aktor yang terlibat terlebih dahulu dalam penyelenggaraan implementasi penyaluran cadangan pangan pokok di kelurahan Mustikajaya. Melalui *key informant* 3 beliau menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan tugas, seperti yang sudah saya sampaikan. Pertama mulai dari kementerian sosial yang berperan memilah dan memilah data masyarakat selain itu surat undangan juga dikirim langsung ke kelurahan. Lalu ada kantor pos, dia mengirimkan beras yang ada di bulog gudang Karawang. Terus kelurahan tentu saja penyelenggara penyaluran cadangan pangan. Tugasnya tidak hanya itu, ada lagi pembagian surat ke masyarakat, di awal kita juga yang mendata masyarakat, kira-kira siapa saja ini yang dapat.”

Tidak hanya pernyataan peranan dan tanggung jawab pemerintah pusat yang dijelaskan, tetapi *key informant* 4 dan 5 menambahkan peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah juga memilikinya. Seperti yang mereka katakan bahwa:

“Kalau untuk kesos karena dia menjadi bapak kasinya beliau lah yang menjadi ketua koordinatornya kelurahannya yang membantu dibagian administrasi, sebagai contoh ketika lagi mau pengambilan pasti ada pendaftaran, yang mengisi pendaftaran adalah si pamor sebagi staf staff bagian kesos. Nahh kegiatan tersebut yang di koordinir bapak kesos. Kalau saya mengkoordinir bagian lapangannya yang mengawasi secara langsung. Selain itu, pamor juga tugasnya kasih surat undangan kepada RT/RW, sedangkan RT/RW itu nanti membagikan kepada masyarakat.”

Sedangkan *key informant* 5 mengatakan bahwa:

*Key informant* 5:

“Selama program ini berjalan saya sebagai bagian staff kesos dan Pamor RW 33, merasa tugas yang diberikan kepada saya tidak ada masalah, masih didalam konteks jobdesk saya yang harus dijalankan.”

*Key informant* 5:

“Terkait pembagian tugas mas, memang semua memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sepertinya yang saya lakukan sebagai pamor yang memberikan surat undangan kepada RT/RW, terus semisal staff kesos yaa mengolah dan memilah data. Kantor pos memberikan surat undangan dan beras dari pusat ke kita. Semua sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.”

Masing-masing *key informant* memberikan gambaran pembagian tugas disetiap posisinya, seperti halnya PSM yang memberikan gambaran seluruh peran dan tanggung jawab aktor di dalam bagian Kesejahteraan umum, sedangkan Pamor berusaha menjelaskan peran dan tanggung jawabnya sendiri dan tugas yang diemban oleh RT/RW.



**Gambar 4. 3 Kegiatan Penyaluran Bantuan Beras**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Hasil observasi mendukung pernyataan dari setiap *key informant* bahwa setiap aktor terlihat menjalankan peran dan tanggung jawabnya, seperti dokumentasi gambar 4.3 yang menjadi

pendukung kuat, dimana terlihat aktor PSM dan Pamor sedang berperan mendata masyarakat yang ingin mengambil beras dan memeriksa persyaratan yang perlu dibawa sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Beberapa pernyataan yang telah disampaikan, semua aktor yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti halnya kantor pos yang memiliki peran dan tanggung jawab menyampaikan beras, dan surat undangan dari pusat kepada pemerintah daerah kelurahan Mustikajaya. Selain itu, pemerintah daerah seperti kepala seksi Kesejahteraan Sosial yang memiliki peran dan tanggung jawab mengkoordinasikan dengan baik seluruh kegiatan implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok. Lalu untuk PSM, mereka memiliki peran dan tanggung jawab memastikan saat penyaluran implementasi program kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, mereka juga memberikan surat undangan dari kantor pos kepada Pamor kelurahan Mustikajaya. Aktor Pamor memiliki peran dan tanggung jawab, memastikan surat undangan sampai kepada RT/RW yang bersangkutan, mereka juga membantu RT/RW jika terdapat kesalahan atau permasalahan di masyarakat, sehingga secara tidak langsung pamor merupakan jembatan bagi masyarakat dengan pemerintah daerah. Aktor RT/RW memiliki peran dan tanggung jawab memastikan surat undangan diberikan kepada masyarakat yang dituju sesuai dengan suratnya, mereka juga yang akan membantu masyarakat mendaftarkan ikut dalam implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok.

Pentingnya strategi aktor dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya tidak lepas dari adanya mekanisme, tahapan, alur yang telah dibangun untuk mengatur jalannya program agar sesuai dengan tujuan awal program dibuat. Tahapan awal dimulai

pada saat kelurahan Mustikajaya melakukan pendataan masyarakat melalui Pamor yang disesuaikan dengan persyaratan, hingga pada masyarakat menerima penyaluran cadangan pangan pemerintah berupa beras. Seperti yang disampaikan *key informant 5*, mengatakan bahwa:

“Tahapan pertama yang dilakukan adalah PSM yang dibantu staff kesos memilah dan memilih siapa saja masyarakat yang sesuai dengan ketentuan penerima program penyaluran cadangan pangan.....”

Pada tahap ini setelah adanya data masyarakat yang masuk ke kelurahan Mustikajaya. Pemerintah melalui PSM menggelar pengecekan lokasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah kelurahan Mustikajaya untuk memastikan apakah layak mendapatkan bantuan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Pengecekan lokasi meliputi kondisi kamar mandi dan dapur, selain itu apakah rumah keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan rumah sendiri atau kontrak. Sebagaimana kegiatan pada gambar berikut.



**Gambar 4. 4 PSM Cek Lokasi KPM**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Alur atau tahapan yang disampaikan *key informant 5*

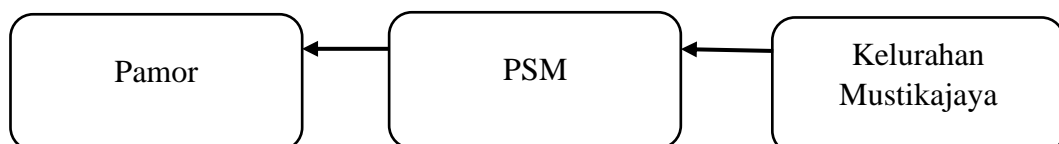
selanjutnya dilengkapi pernyataan dari *key informant* 4, beliau mengatakan bahwa:

“Tahapan awal mulai dari kementerian sosial yang memilah dan menetapkan nama-nama yang menerima bantuan, selanjutnya nama-nama tersebut dikirmkan kepada kantor pos, nanti kantor pos menyerahkan kepada TKSK selanjutnya diserahkan ke kita PSM Kelurahan, setelah itu kami menyerahkan surat undangan tersebut kepada pamor, nahh pamor lahh yang menyerahkan surat undangan kepada RT/RW dan terakhir mereka menyerahkan undangan tersebut ke masyarakat.”

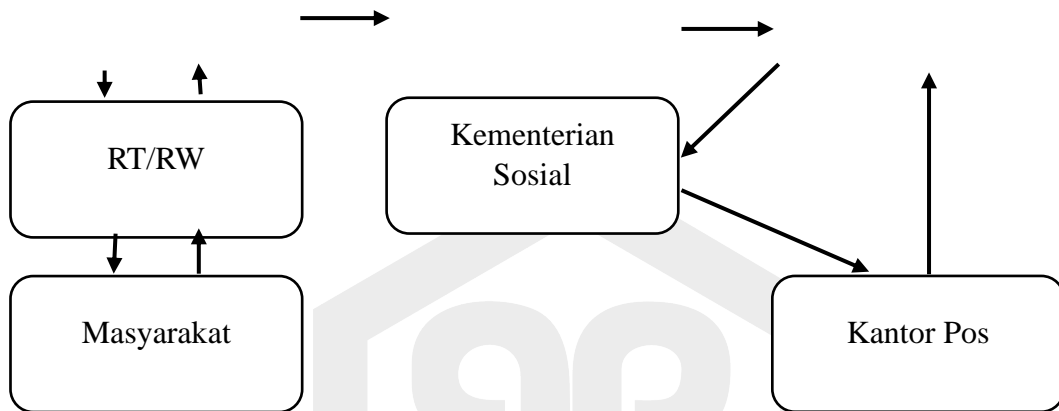
Ketika kantor pos telah mengirimkan beras kepada kelurahan Mustikajaya dan Kementerian Sosial menyerahkan surat undangannya. Pemerintah daerah seperti Kelurahan Mustikajaya bergerak menyusun penyelenggaraan penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah. Seperti yang disampaikan *key informant* 3 mengatakan bahwa:

“Alurnya pertama kita menunggu surat undangan dan beras yang dikirimkan melalui kantor pos. Nantinya kita bisa proses penyebaran surat undangan melalui pamor kita, setelah penyebaran baru kita buat tanggal dan waktu yang diinginkan untuk pembagian beras. Begitu hari pelaksanaan pengambilan beras, masyarakat pertama diarahkan untuk pengambilan nomor urut dulu, nanti dipanggil menuju loket juru bayar untuk proses memasukan by sistem, kaitannya berkas-berkas penerima bantuan beras tersebut.”

Pernyataan yang telah disampaikan berbagai *key informant*, menyatakan bahwa setiap aktor dan lembaga menempati alur atau mekanisme masing-masing. Alur atau tahapan yang tercipta di lapangan dapat digambarkan sebagai berikut:







**Label 4. 1 Alur atau Tahapan Program**

*Sumber: diolah peneliti, 2024*

Pada gambar diatas, alur dimulai dari masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan memerlukan pendaftaran diri kepada Kelurahan Mustikajaya melalui RT/RW lalu Pamor, dan PSM menyerahkan kepada Kelurahan Mustikajaya. Setelah itu pemerintah daerah mengajukan kepada Kementerian Sosial. Setelah adanya data masyarakat terkumpul, Kementerian Sosial menyiapkan beras dan surat undangan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan Kantor pos untuk disalurkan kepada pemerintah kelurahan Mustikajaya. Setelah surat undangan dan beras diterima di Kelurahan Mustikajaya, surat undangan dikirim langsung kepada masyarakat melalui PSM diteruskan kepada Pamor, dan RT/RW memberikan kepada masyarakat yang dituju. Dan terakhir setelah disepakatinya tanggal dan waktu penyaluran implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok, Kelurahan Mustikajaya memberikan beras kepada masyarakat dengan bantuan PSM untuk mengkoordinasikan di lapangan sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Peran, tanggung jawab, dan mekanisme penyaluran cadangan pangan pokok memperkuat terbentuknya strategi kepentingan yang

dibangun beberapa aktor untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi penting dilakukan sebagai upaya implementor dalam mendukung keberhasilan implementasi. Hasil observasi yang telah dilakukan pada saat tahapan pembagian beras kepada masyarakat, kantor pos memiliki strategi khusus dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Kantor pos menyediakan aplikasi dan berita acara sebagai bentuk pemantauan kesesuaian data antara KPM dengan data yang dimiliki kantor pos.

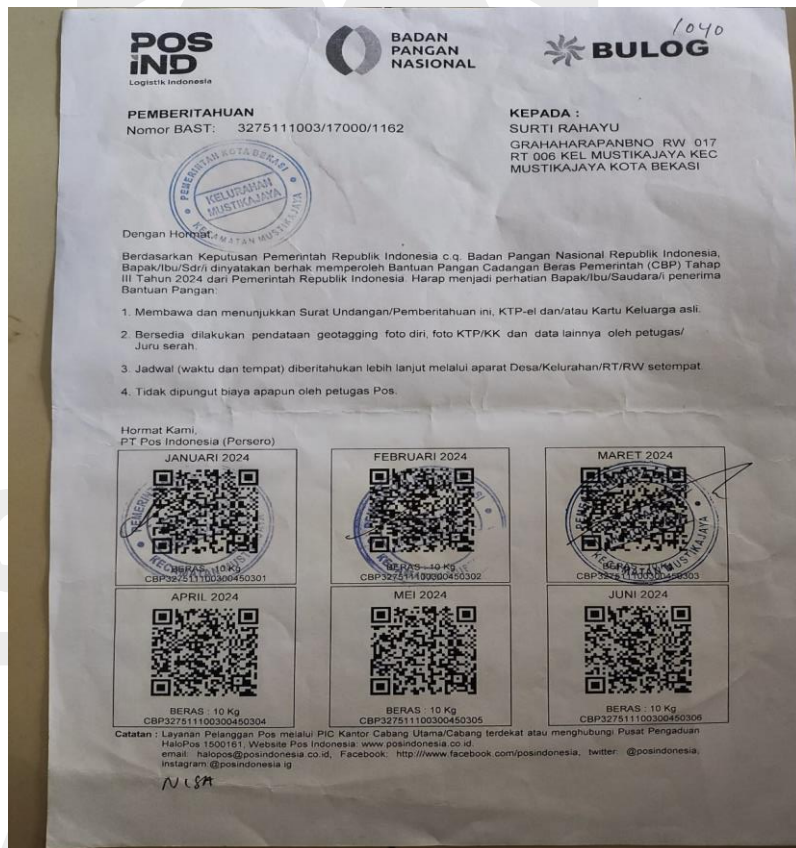


**Gambar 4. 5 Berita Acara Serah Terima Bantuan**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Dokumentasi yang diambil pada saat tahapan penyerahan bantuan memuat beberapa hal penting, seperti nama KPM, Wilayah KPM, nomor barcode KPM, jumlah beras yang diterima, tanda tangan KPM, dan tanggal penyerahan beras kepada KPM. Dalam hasil dokumentasi dan observasi, strategi yang diciptakan kantor pos dapat dikatakan mendukung tujuan implementasi, sehingga menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat.

Hasil observasi lain juga menemukan strategi yang kurang baik disaat tahapan pembagian surat undangan kepada KPM. Beberapa aktor RT/RW melakukan fotokopi surat undangan resmi yang diberikan kelurahan Mustikajaya. Pada saat dilapangan surat undangan yang di fotocopy sudah dirobek, hal ini dilakukan untuk mencegah permasalahan terulang kembali.



Gambar 4. 6 Surat Undangan Masyarakat

Sumber: hasil observasi peneliti, 2024

Dokumentasi yang dipergunakan merupakan salah satu surat undangan resmi milik kementerian sosial yang dapat dipergunakan untuk syarat KPM mengambil beras tersebut. Ketika KPM menerima surat undangan yang fotocopy maka KPM tidak dapat mengambil beras disaat tahapan pengambilan beras berlangsung.

Hal senada disampaikan *key informant* 4 dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“..... Satu kesalahan lagi, dimana RT pernah memberikan undangan yang bukan kepada orang yang bersangkutan tetapi kepada orang lain, padahal orang yang seharusnya ditujukan masih ada ditempat. Ternyata oknum RT melakukan fotocopy undangan tersebut, ketika undangan di fotocopy otomatis undangan ada 2, dimana undangan pertama diberikan kepada yang bersangkutan sedangkan undangan yang kedua diberikan kepada orang lain. Ketika masalah tersebut muncul mekanisme atau tahapan akan terganggu. Semisal salah satu undangan sudah mengambil berasnya, tiba-tiba undangan satu lagi hadir dan itu tidak bisa kita berikan, padahal yang asli merupakan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut.”

Hasil wawancara dan observasi mengungkapkan bahwa terdapat implementor yang melakukan strategi yang kurang baik, sehingga mengakibatkan mekanisme implementasi belum berjalan secara maksimal. Strategi negatif yang diterapkan aktor RT/RW memberikan banyaknya keluhan masyarakat yang mengeluhkan tidak dapat menerima bantuan tersebut.

**c. Karakteristik Lembaga dan Penguasa (*Institution And Regime Characteristics*).**

Suatu program dapat dikatakan berhasil atau gagal, ketika program tersebut diselenggarakan. Keterlibatan para aktor dan lembaga serta tahapan atau alur yang sudah tersedia menjadi salah satu faktor terlaksananya kegiatan program dengan baik. Namun dibalik semua itu tidak menutup kemungkinan karakteristik aktor menjadi sumber perubahan dalam menentukan tahapan atau mekanisme program penyaluran cadangan pangan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informant* 4 menjelaskan bahwa:

“Tentu saja, kita disini sebagai pemerintah daerah menjadi koordinator dan pelaksana kegiatan pembagian beras, kalau kita gak ada masyarakat bingung harus bagaimana dan seperti apa.”

Berdasarkan wawancara dengan *key informant* 4, beliau memberikan gambaran bahwa kelurahan Mustikajaya memiliki karakteristik mengayomi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan cadangan pangan pokok, hal ini terlihat ketika mereka siap melayani setiap KPM pada saat tahapan pemberian bantuan beras di kelurahan Mustikajaya. *Key informant* 3 juga menyampaikan bahwa:

“Kita sering mengadakan rapat sebelum program ini berjalan, biasanya rapat ini banyak dihadiri dari pihak kantor pos, dinas ketahanan pangan, dinas sosail, dan jajaran kelurahan. Biasanya ada agenda yang memang khusus membahas bagaimana sih mengatasi masalah ini, di situ kita rembukin bersama, pecahkan masalahnya bersama.”

Tidak hanya mengayomi masyarakat, kelurahan Mustikajaya melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sedang berkembang. Hal ini menggambarkan bahwa karakteristik kelurahan Mustikajaya sangat terbuka dan partisipasi dalam menyelesaikan masalah.



**Gambar 4. 7 Pelayanan Kelurahan Mustikajaya**

*Sumber: hasil observasi peneliti,2024*

Hasil observasi menunjukkan pada tahapan penyaluran beras kepada KPM, seluruh aktor kelurahan Mustikajaya seperti PSM,

Pamor, dan Ketua seksi Kesejahteraan Sosial melayani setiap masyarakat yang hadir untuk mengambil bantuan beras cadangan pangan pangan pokok. Jika melihat dari hasil observasi dan wawancara, karakteristik kelurahan Mustikajaya dapat dikatakan baik dalam mengayomi masyarakat dan keterbukaan partisipasi. Tidak hanya pemerintah kelurahan Mustikajaya yang disoroti, tetapi ketika melihat karakteristik pada masing-masing aktor pelaksana program, terdapat hal yang mengejutkan disampaikan *key informant 4* bahwa:

“Kalau untuk kesalahan, kalau kita mengikuti aturan, undangan yang sudah sesuai dengan by name by address otomatis nanti kita periksa KTPnya sesuai atau tidak. Kesalahan terlihat ketika di sektor RT/RW salah memberikan arahan, padahal kita sudah mengadakan penyuluhan sebelumnya, seperti contohnya surat undangan tidak boleh di laminating tetapi masyarakat ada saja yang melakukan laminating. Ketika itu terjadi kita tidak bisa melakukan scan barcode yang ada di surat undangan tersebut...”

Hasil wawancara dengan *key informant 4* memberikan gambaran bahwa karakteristik kurang baik diperlihatkan oleh aktor RT/RW, dimana mereka kurang mengayomi masyarakat dalam mengarahkan masyarakat untuk patuh terhadap syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tidak hanya itu, wawancara dengan *key informant 6* menjelaskan bahwa:

“..... saya jarang dapat surat undangan dari pak RT. Seringnya saya dapat dari ketua PSMnya langsung, apalagi pamor gak pernah kasih tahu saya.”

Pernyataan dari *key informant 6* memperkuat karakteristik kurang baik dari aktor RT/RW. Pada tahapan pemberian surat undangan kepada KPM, aktor RT/RW tidak memberikannya kepada KPM. *Key informant 6* merasa PSM dan Pamor yang sering memberikan surat undangan tersebut. Sehingga menjadi pertanyaan besar kemana peran dan tanggung jawab beberapa aktor

RT/RW sebagai implementor kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok. Melalui hasil observasi, pada tahapan pembagian surat undangan kepada masyarakat, peneliti didampingi PSM memberikan langsung surat undangan tersebut kepada KPM, sebagaimana pada gambar berikut.



**Gambar 4. 8 Pemberian Surat Undangan**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Pada dasarnya KPM menginginkan peran aktor RT/RW dalam penyelenggaraan implementasi penyaluran cadangan pangan pokok, seperti yang disampaikan *key informant* 6 yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya penting sih, semisal terjadi kesalahan kalau gak ada dia bagaimana urusannya?....”

Hasil wawancara dengan *key informant* 6 tersebut menggambarkan pentingnya keberadaan atau peran dari aktor RT/RW dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah kesalahan yang mungkin timbul.

Sumber yang ditemukan berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi memberikan penjelasan saat penyelenggaraan implementasi penyaluran cadangan pangan pokok dijalankan. Bahwasanya peneliti menyimpulkan menemukan fakta bahwa terdapat aktor yang bermasalah, aktor itu adalah beberapa RT/RW

daerah yang kurang maksimal dalam mengayomi masyarakatnya, sehingga alur atau tahapan yang dibangun terpengaruh terhadap kesalahan tersebut. Salah satu masalah yang cukup fatal adalah surat undangan yang semestinya diberikan kepada masyarakat ditemukan tidak diberikan kepada masyarakat, RT/RW memperlakukan surat undangan tersebut. Akibatnya banyak permasalahan yang muncul setelah beberapa RT/RW memainkan surat undangan tersebut.

Karakteristik aktor RT/RW yang kurang baik tentu membuat masyarakat merasakan kekesalan, dampaknya tidak hanya kepada aktor yang bermasalah tetapi masyarakat juga akan menyalahkan sepenuhnya kepada kelurahan Mustikajaya, sehingga kepercayaan yang mereka telah bangun bisa menjadi kehancuran.

**d. Kepatuhan Dan Daya Tanggap (Compliance And Responsiveness).**

Kehadiran suatu kebijakan bisa menjadi sebuah kabar baik bagi target sasaran yang ingin diselesaikan masalahnya. Mengacu pada Perwal Kota Bekasi 65A tahun 2021, tujuan penyaluran cadangan pangan pokok kepada masyarakat adalah meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan. Selain itu, pemerintah kota Bekasi juga ingin memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan. Melihat hal tersebut, sewajarnya kelurahan Mustikajaya merespons baik adanya kebijakan tersebut. Melalui wawancara dengan *key informant 5* mengatakan bahwa:

“Bantuan penyaluran cadangan pokok alhamdulillah selalu tersalurkan dengan baik, tidak sampai ada penumpukan beras maupun masyarakat di kelurahan mustikajaya, jadi apa yang mereka dapatkan sesuai dari tahun sebelumnya, sehingga buat mereka patuh sampai sekarang.”



Hasil wawancara dengan *key informant* 5 menggambarkan bahwa kelurahan Mustikajaya merespons baik kedatangan kebijakan tersebut, hal ini terlihat mereka selalu berhasil memberikan bantuan beras kepada masyarakat tanpa adanya penumpukan diwilayah tersebut.



**Gambar 4. 9 Gudang Penyimpanan Beras**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil observasi di kelurahan Mustikajaya, ketika memasuki tahapan penerimaan beras yang dikirimkan dari kantor pos, gudang yang dipergunakan untuk menyimpan beras selalu siap dan kelurahan Mustikajaya menjaga menyusunnya dengan sangat baik. Terlihat pada gambar yang memperlihatkan gudang penyimpanan bantuan beras yang siap dipergunakan. Respons baik juga disampaikan *key informant* 5 yang mengatakan bahwa:

“Jadi gini, saya merasa senang jika ada kebijakan yang tepat sasaran kepada masyarakat, mereka juga merasa terbantu.....”

Pernyataan *key informant* 5 semakin memperkuat bahwa kelurahan Mustikajaya merespons baik kehadiran kebijakan penyaluran cadangan pangan pokok di wilayahnya. Kesenangan tidak hanya terlihat dari pemerintah kelurahan Mustikajaya, masyarakat khususnya KPM merespons dengan sangat gembira, seperti yang disampaikan 2 orang *key informant* 6 bahwa:

*Key informant* 6:

“Yaa senang lahh, pastinya meringankan beban keluarga yang harusnya keluar uang untuk beras tapi sudah tidak lagi. Kalau merasa kecewa tentu tidak, karena semua berjalan normal-normal saja, asalkan kita bawa KTP, KK, dan surat undangan sudah pasti dapat, pihak kelurahan pun pasti tidak akan menyulitkan warga. Apalagi berasnya wangi banget kalau sudah di masak.”

Key informant 6:

“Yaa meringankan lahh, jadi gak perlu beli beras lagi, apalagi kalau harga beras lagi naik, sangat membantu saya banget.”

Hasil wawancara dari 2 orang *key informant* 6 menggambarkan jelas bahwa respons senang adanya kebijakan penyaluran cadangan pangan beras. Mereka merasakan keringanan dengan adanya pemenuhan beras sebagai pangan pokok, selain itu mereka juga tidak perlu membeli beras lagi. Kemudahan pengambilan beras di kelurahan Mustikajaya juga menjadi respons kesenangan mereka.

Kehadiran kebijakan tidak hanya menimbulkan respons dari berbagai pihak, tetapi dibarengi dengan kepatuhan akan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan saat tahapan penyaluran beras kepada masyarakat di kelurahan Mustikajaya. Kantor pos selaku lembaga yang bertanggung jawab memantau penyelenggaraan penyaluran bantuan cadangan pangan pokok kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat bahwa setiap pengambilan beras selalu

membawa surat undangan asli, KTP, dan KK. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah target sasaran dan juga menghindari kesalahan memasukkan data KPM. Pada wawancara *key informant* 6 mengatakan bahwa:

“Kalau diri sendiri tidak pernah mengalami, tetapi kalau melihat pernah ada, kayak semisal warga yang mengeluh ribet banget sih timbang ambil beras saja harus bawa-bawa KTP. Ada juga yang mengeluhkan saya baru dapat beras bulan ini, kok bulan sebelumnya tidak dapat, dan ternyata ditelusuri, pihak RT/RW yang memberikan surat undangan 2 bulan setelahnya, sehingga warga hanya bisa mendapatkan sisanya. Tanggapan yang diberikan pihak kelurahan, mereka langsung merespon cepat dengan menghubungi RT/RW yang bersangkutan, jadinya ketahuan ini dimana letak permasalahannya.”

Hasil wawancara dengan *key informant* 6 menemukan bahwa beberapa masyarakat tidak membawa KTP sebagai syarat pengambilan beras. Hal ini menggambarkan beberapa masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, sedangkan KTP yang menjadi syarat merupakan barang yang sering dibawa sebagai bukti kependudukan di Indonesia. Tingkat kepatuhan rendah juga ada dalam implementor kebijakan, aktor RT/RW menjadi implementor yang kurang patuh dalam menjalankan peran tanggung jawabnya. Terlihat dari hasil wawancara dengan *key informant* 6 yang mengatakan bahwa aktor RT/RW telat memberikan surat undangan hingga 2 bulan lamanya. Hal ini berakibat pada KPM yang tidak mendapatkan beras di awal bulan pembagian bantuan beras.

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen mengkonfirmasi bahwa masyarakat khususnya KPM dan pemerintah kelurahan Mustikajaya merespons senang dengan adanya program penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah. Mereka menyatakan senang terbantu adanya bantuan pangan

pokok berupa beras, tetapi dilain sisi kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan kebijakan perlu diperhatikan, beberapa aktor RT/RW yang mencoba memainkan program dengan bermain dengan surat undangan kepada masyarakat.

## **B. Pembahasan**

Penyelenggaraan implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah oleh Kelurahan Mustikajaya membawa angin segar untuk perekonomian masyarakat. program ini bergerak sebagai bentuk bantuan beras yang bertujuan memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat. Sebuah implementasi program pastinya memiliki faktor penting agar tercapainya tujuan yang diinginkan, salah satu faktor utama adalah dukungan sumber daya manusia. Keberadaan aktor atau lembaga menjadi eksekutor bagi program yang ingin dijalankan, sehingga peranan dan tanggung jawab yang dimiliki tidak bisa dipergunakan secara pribadi. Selain itu faktor partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung pengimplementasian program tersebut. Dukungan atau keikutsertaan masyarakat memberi pengaruh besar terhadap program tersebut.

Penilaian terhadap implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok dapat dilakukan dengan menganalisis melalui berbagai cara, salah satunya dengan melihatnya secara kontekstual. Salah satu ahli kebijakan publik yang melihat implementasi publik secara kontekstual adalah Merilee S. Grindle (1980). Dinamika proses implementasi ini menurutnya memerlukan variabel *Policy Context*, variabel tersebut mempresentasikan Konteks implementasi akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Analisis implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok yang dilakukan di wilayah kelurahan Mustikajaya dengan menggunakan Konteks implementasi menurut Grindle (1980) memberikan gambaran sebagai berikut:

### **1. Kekuasaan (Power)**

Konteks implementasi program yang dikemukakan oleh Grindle (1980), konsep kekuasaan (*power*) merujuk pada kemampuan atau otoritas untuk memengaruhi atau mengubah perilaku, keputusan, atau tindakan orang lain dalam konteks proses implementasi kebijakan publik. Kekuasaan (*power*) menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi dinamika implementasi kebijakan dan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat. Hasil lapangan menunjukkan bahwa, konteks kekuasaan berhubungan langsung dengan peran dan tanggung jawab aktor dan lembaga. Terkait dengan lokus Kelurahan Mustikajaya, kekuasaan tertinggi dipegang langsung oleh Lurah yang mendisposisikan kepada Kepala seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos), artinya Kesos tanggung jawab besar atas implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok di kelurahan Mustikajaya. Ketika melihat dari sisi alur atau tahapan yang ada, masing-masing aktor atau lembaga memiliki peran dan tanggung jawabnya, sehingga terdapat alur yang terlewatkan akan menimbulkan ketidaksesuaian tujuan yang ingin dicapai.

Jika diperhatikan birokrasi lebih kebawah, ketika alur atau tahapan sampai kepada penyerahan surat undangan dari RT/RW ke masyarakat. kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya, pengakuan masyarakat dan hasil observasi secara langsung menerangkan peran RT/RW tidak kelihatan sama sekali. Dimana dalam

satu kejadian masyarakat tidak mendapatkan surat undangan langsung dari RT/RW setempat. Penyusuran kepada koordinator lapangan, surat undangan sering di salahgunakan oleh aktor RT/RW untuk kepentingan pribadi, penemuan terungkap ketika masyarakat yang sudah mendaftarkan diri melaporkan kepada Pamor merasa tidak mendapatkan surat undangan dari kelurahan Mustikajaya, padahal Pamor sudah tidak memegang surat undangan tersebut. Artinya besar kemungkinan surat undangan berada di tangan RT/RW setempat dan belum diberikan kepada masyarakat.

Surat undangan yang seharusnya RT/RW serahkan kepada penerima bantuan sesuai dengan nama dan alamat yang sudah dicantumkan, tetapi kenyataannya mereka pergunakan untuk kepentingan pribadi. Melalui pengakuan dari Ketua PSM yang menerima laporan masyarakat, beberapa aktor RT/RW mempergunakan surat undangan tersebut untuk orang lain mengambil bantuan yang bukan miliknya. Selain itu, aktor RT/RW pergunakan untuk diperjualbelikan kembali, sehingga hasil penjualan dipergunakan pribadi.

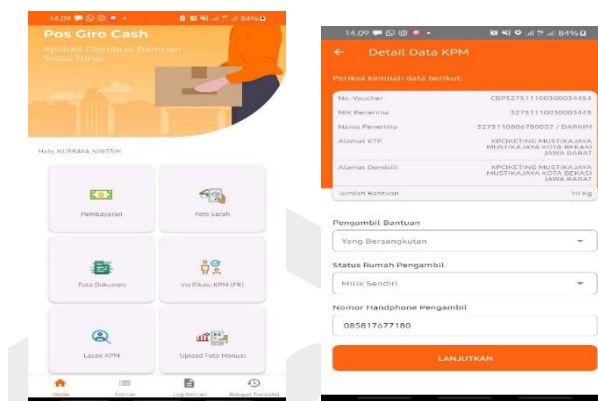
Aktor RT/RW beralasan bahwa masyarakat lain juga butuh bantuan tersebut, sedangkan warga yang namanya tercantum dalam surat undangan sudah sering mendapatkan program bantuan yang sama. Walaupun demikian, kekuasaan yang dipegang RT/RW tidak bisa dipergunakan sesuka hati, kekuasaan yang berperan menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan ada pada kementerian sosial. Sedangkan RT/RW hanya bisa memberikan saran warganya kepada pemerintah pusat untuk ditindak lanjuti. Dalam hal konteks kekuasaan, kelurahan Mustikajaya belum secara efektif bertanggung jawab atas peran yang diembannya. Karena peran RT/RW sebagai implementor yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, mengakibatkan

pemberian bantuan tidak terdistribusi sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada.

## **2. Strategi Kepentingan dari Aktor yang Terlibat (Interest Strategies Of Actors Involved).**

Konteks kedua merujuk pada upaya dari berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk mempengaruhi proses implementasi kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Aspek model Grindle (1980) mengatakan bahwa berbagai aktor dalam konteks implementasi kebijakan memiliki kepentingan yang beragam dan sering bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka menggunakan berbagai strategi untuk melindungi, mempromosikan, atau memperjuangkan kepentingan mereka. Berbagai aktor dan lembaga memiliki strategi khusus dalam menjalankan tanggung jawab dan perannya dalam implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok. Jika dilihat dari hasil lapangan, pemerintah Kelurahan Mustikajaya pastinya menginginkan masyarakatnya yang kurang mampu menerima bantuan program tersebut. Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah mengadakan penyuluhan kepada seluruh aktor dan lembaga yang terlibat dalam program penyaluran cadangan pangan pokok, sehingga diharapkan seluruh aktor memahami seluruh rangkaian program yang diselenggarakan kelurahan Mustikajaya.

Kantor pos merupakan salah satu lembaga yang ikut berperan dalam mengirimkan beras dan surat undangan dari pemerintah pusat. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, mereka memiliki strategi khusus dengan membuat aplikasi khusus yang berfungsi mendata masyarakat yang mendapatkan beras, selain itu aplikasi digunakan untuk mendata siapa yang menerima beras tersebut pada saat tanggal dan waktu penyaluran cadangan pangan pokok.



**Gambar 4. 10 Aplikasi Kantor Pos**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Gambar diatas merupakan aplikasi yang disediakan kantor pos dalam menjalankan strateginya. Aplikasi hanya digunakan oleh PSM yang membantu Kelurahan Mustikajaya dan kantor pos dalam menginput data masyarakat yang mengambil beras di lapangan. Kelengkapan dan fiturnya mengedepankan transparansi, seperti halnya fitur detail data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fitur ini memuat pengisian data warga yang mengambil beras tersebut, pengambilan beras dapat diwakilkan oleh keluarganya yang masih satu KK dengannya, maka dari itu perlu pencatatan data siapa yang mengambilnya. Selain itu, fitur dokumentasi dan scan barcode menjadi pelengkap aplikasi kantor pos, dimana surat undangan masyarakat memuat barcode akan di scan dan dianggap sudah mengambil, sehingga ketika barcode tersebut tidak dapat dipergunakan kembali. Beberapa fitur tersebut sangat membantu dalam implementasi program, sehingga dapat berjalan sesuai dengan data masyarakat yang menerima bantuan.

JATIASIH	JATIMEKAR	1,991	1,9	91	95.43 %
	JATIASIH	1,351	1,351	0	100.00 %
	JATIKRAMAT	1,517	1,474	43	97.17 %
	JATIRASA	705	704	1	99.86 %
	JATILUHUR	977	977	0	100.00 %
JATISAMPURNA	JATISARI	1,364	1,364	0	100.00 %
	JATISAMPURNA	1,331	1,267	64	95.19 %
	JATIKARYA	683	678	5	99.27 %
	JATIRANGGON	1,526	1,467	59	96.13 %
	JATIRANGGA	828	661	167	79.83 %
MUSTIKAJAYA	JATIRADEN	1,09	1,042	48	95.60 %
	PADURENAN	1,818	1,818	0	100.00 %
	CIMUNING	530	530	0	100.00 %
	MUSTIKAJAYA	1,357	1,308	49	96.39 %
PONDOK MELATI	MUSTIKASARI	1,515	1,512	3	99.80 %
	JATIRAHAYU	2,481	2,431	50	97.98 %
	JATIWARNA	1,014	1,014	0	100.00 %
	JATIMELATI	592	592	0	100.00 %
	JATIMURNI	1,243	1,243	0	100.00 %

**Gambar 4. 11 Data Penerima Program**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*



Aplikasi kantor pos tidak hanya untuk mendata saja, mereka menciptakan aplikasi untuk bisa merekap sebagai bukti laporan mereka kepada pemerintah pusat. Aplikasi kantor pos menjadi contoh strategi mereka dalam menyukseskan implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah.

Tidak hanya pemerintah saja yang mempersiapkan strategi, masyarakat sebagai penerima manfaat dan memiliki kepentingan untuk mendapatkan bantuan tersebut memiliki strateginya, salah satu masyarakat menyampaikan bahwa mereka perlu mempersiapkan diri untuk mendaftarkan diri mereka kepada kelurahan Mustikajaya, sehingga nantinya mereka akan mendapatkan surat undangan dari pemerintah kelurahan Mustikajaya dan mendapatkan bantuan tersebut. PSM juga menambahkan bahwa data masyarakat yang mendaftarkan diri dari Januari sampai Desember akan dikumpulkan dan dipilah pilih kembali oleh kementerian sosial.

Kepentingan dan strategi dari aktor terutama pemerintah Kelurahan Mustikajaya masih belum efektif. Walaupun telah menyelenggarakan penyuluhan sebelum implementasi program dijalankan, aktor dibawah seperti RT/RW masih memiliki kepentingan dan strateginya untuk tujuan pribadi. Koordinator petugas lapangan menyampaikan bahwa, beberapa aktor RT/RW terlihat memfotokopi surat undangan dengan tujuan yang tidak di ketahui. Tindakan tersebut sangat merugikan, masyarakat yang seharusnya menerima undangan dan mendapatkan beras bulan tersebut tidak bisa diambil, karena punya mereka sudah diambil oleh aktor yang tidak bertanggung jawab. Ketika berbagai strategi direncanakan dan mendahulukan kepentingan luas, tidak akan tercapai tujuan awal program tersebut jika masih terdapat aktor yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti peran mereka.

### 3. Karakteristik Lembaga dan Penguasa (*Institution And Regime Characteristics*).

Konteks ketiga dalam teori Grindle (1980) mengartikan bahwa ciri-ciri atau atribut-atribut yang dimiliki oleh lembaga-lembaga dan rezim-rezim politik dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Aspek ketiga memfokuskan bahwa karakteristik dari lembaga-lembaga pemerintah dan kondisi politik dalam sebuah negara memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana kebijakan diimplementasikan. Implementasi program penyaluran cadangan pokok pemerintah dilakukan pada masing-masing wilayah diseluruh Kota Bekasi, salah satunya pemerintah daerah yang mau berkerjasama dan menyelenggarakannya adalah kelurahan Mustikajaya. Kelurahan Mustikajaya masih melihat dan memikirkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga pengimplementasian program masih terus berjalan sampai saat ini. Karakter kelurahan yang diperlihatkan terlihat baik, salah satunya tercermin saat implementasi program berjalan.



**Gambar 4. 12 Suasana Penyelenggaraan Program**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024*

Gambar diatas memperlihatkan situasi di lapangan tempat implementasi program penyaluran beras kepada masyarakat. Terlihat PSM yang dibantu staf bagian Kesejahteraan Sosial dan pamor kelurahan Mustikajaya sedang menyerahkan beras kepada masyarakat. Salah satu bentuk karakteristik yang terlihat adalah gotong royong saling melengkapi dan niat semangat mengayomi masyarakat yang ingin mengambil beras. Saat observasi dilakukan kelurahan Mustikajaya menekankan karakteristik kolaborasi, dimana mereka mampu menggandeng Pekerja Sosial Masyarakat dan pamor, hal ini bertujuan untuk mendukung implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah, peran mereka yang langsung turun kepada masyarakat memudahkan kelurahan mendapatkan data yang konkrit.

Disamping itu, karakteristik yang menonjol terlihat ketika peran dan tanggung jawab RT/RW kurang berjalan secara maksimal. Ketegasan kelurahan Mustikajaya diperlihatkan dengan menggantikan peran RT/RW kepada pamor dan PSM, sehingga surat undangan tetap diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Kelurahan Mustikajaya berani dan tegas untuk mengubah alur dan tahapannya secara cepat agar masyarakat mendapatkan haknya. Karakteristik lembaga yang diperlihatkan kelurahan Mustikajaya dapat dikatakan mempengaruhi baiknya hasil implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok. Berbanding terbalik dengan karakteristik aktor yang terlibat khususnya RT/RW, secara terbuka mereka memperlihatkan karakteristik yang kurang mengayomi warganya. Dimana, kurangnya perhatian yang diberikan RT/RW kepada masyarakatnya mempengaruhi buruknya implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah.

#### **4. Kepatuhan Dan Respons (Compliance And Responsiveness).**

Konteks keempat melihat dua variabel yang penting dalam menganalisis implementasi kebijakan publik. Kepatuhan dan Respons akan menyoroti bahwa dalam proses implementasi kebijakan, para pelaksana kebijakan yang berasal dari pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat sipil harus dapat memenuhi dua tuntutan utama, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang ditetapkan, serta daya tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan yang muncul dari lingkungan sekitarnya. Pemerintah kelurahan Mustikajaya berperan sebagai lembaga yang menyelenggarakan implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok saja, sehingga aturannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat ataupun melalui kantor pos. Hasil penemuan lapangan membuktikan, syarat pengambilan beras harus membawa surat undangan asli, KTP, dan KK. Selain itu, kelurahan Mustikajaya perlu memastikan beras diberikan kepada masyarakat yang sesuai, maka dari itu kantor pos mewajibkan untuk menginput data melalui aplikasi mereka, sehingga harapannya beras bisa sampai kepada masyarakat.

Pada konteks kepatuhan dan respons aktor yang terlibat dalam program masih belum dijalankan secara optimal. Melihat kembali aktor RT/RW yang terlibat penyalahgunaan peran dan tanggung jawab, terbukti melanggar persyaratan. RT/RW ditemukan memfotokopi surat undangan, dimana hal ini melanggar persyaratan. Masyarakat merasa dirugikan dengan adanya perilaku tersebut, hal ini karena persyaratan pengambilan beras di kelurahan membutuhkan surat undangan asli bukan fotokopi, sehingga ketika ada seseorang yang memiliki surat undangan yang asli, mereka bisa mempergunakannya untuk pribadi. Tidak hanya aktor kelurahan yang melanggar kepatuhan, masyarakat juga melakukan laminating surat undangan, dimana seharusnya surat undangan tersebut tidak boleh dilaminating. Hal ini akan

mempengaruhi aplikasi kantor pos, fitur scan barcode yang ada di aplikasi tidak dapat dipergunakan karena adanya laminating yang ada di surat undangan. Secara tidak langsung data tidak dapat diinput kedalam sistem kantor pos.

### **C. Sintesis Pemecahan Masalah**

Suatu program pemerintah pusat yang telah disahkan dan ditetapkan perlu adanya proses kelanjutan. Implementasi menjadi salah satu proses selanjut untuk dapat menguji program tersebut. Sama halnya dengan program penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah yang perlu diimplementasikan melalui pemerintah daerah. Kelurahan Mustikajaya menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan program penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah. Keterbatasan kuota yang diberikan pemerintah pusat, menjadi sebuah masalah bagi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat kurang mampu mendapatkan hak atas program tersebut. Penelitian akan mengangkat berkaitan dengan aktor dan lembaga yang terlibat dalam implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui metode telaah dokumen, wawancara, dan observasi kepada 6 informan aktor yang terlibat dalam implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok di kelurahan Mustikajaya, keterlibatan mereka dipilih karena memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup penting di dalam programnya. Salah satu aktor yang terlibat yaitu RT/RW banyak ditemukan masalah yang cukup serius, mereka banyak menggunakan peran dan tanggung jawabnya hanya untuk kepentingan pribadi. Surat undangan yang semestinya diberikan masyarakat dipermaikan aktor tersebut. Kurangnya peran dan tanggung jawab dalam hal ini pihak RT/RW mempengaruhi kepentingan dan strategi yang sudah dibangun baik oleh kelurahan mustikajaya, kantor pos, dan masyarakat. Pemerintah berkepentingan untuk membantu masyarakat tidak mampu dengan

meringankan beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan pokoknya, begitu juga dengan kantor pos yang memiliki strategi transparansi disetiap alur atau tahapannya dengan mengandalkan aplikasi yang telah dibuatnya. Kepentingan dan strategi mereka harus terhalang oleh aktor RT/RW yang tidak bertanggung jawab.

Karakteristik yang dibangun pemerintah kelurahan Mustikajaya, kantor pos, dan masyarakat sudah sangat baik. Mereka memperlihatkan kerjasama saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama dalam implementasi program penyaluran cadangan pangan pokok. Berbanding terbalik dengan karakteristik aktor RT/RW yang memperlihatkan keegoisannya untuk mendapatkan hasil dan tujuannya secara pribadi. Adanya karakteristik keegoisan mereka, persyaratan yang telah dibangun dan disepakati bersama dilanggar olehnya. Surat undangan yang seharusnya asli dipertunjukkan dengan memfotokopinya menjadi 2 surat undangan. Sehingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut, diambil alih oleh orang lain.

Berdasarkan data-data permasalahan implementasi penyaluran cadangan pangan pokok diatas, berikut alternatif rekomendasi yang dapat diberikan kepada implementasi program tersebut. Harapannya kelurahan Mustikajaya dapat berkembang dan secara efektif menyelenggarakan program penyaluran cadangan pangan pokok ini.

1. Pemerintah kelurahan Mustikajaya bisa mengeluarkan surat peringatan atau teguran kepada aktor RT/RW yang terlihat menyalahgunakan peran dan tanggung jawabnya, sehingga hal serupa tidak terulang kembali disaat pelaksanaan implementasi program.
2. Pemerintah kelurahan Mustikajaya melakukan pengawasan terhadap aktor RT/RW dilapangan. Melalui PSM atau Pamor mereka mendampingi RT/RW dalam membagikan surat undangan tersebut. Sehingga mengurangi terjadinya kecurangan yang dimainkan aktor RT.RW.

3. Pemerintah kelurahan Mustikajaya melakukan penyederhanaan birokrasi, dimana mereka bisa memberikan surat undangan tersebut langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara aktor RT/RW, begitu juga dengan pendataan masyarakat yang tidak mampu, mereka bisa langsung terjun ke lapangan kepada masyarakat untuk mendata masing-masing wilayahnya, sehingga diharapkan kuota yang terbatas dapat dimaksimalkan dengan baik.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**